



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

**SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Mandat Kerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	57
1.4 Isu-isu Strategis .....	58
1.5 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	59
1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	68
1.7 Tindak lanjut atsa Laporan Hasil Evaluasi SAKIO Tahun 2023	69
1.8 Langkah Perbaikan Internal.....	70
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	73
2.1 Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	73
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	77
2.3 Perjanjian Kinerja .....	86
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	110
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	116
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	116
3.2 Realisasi Anggaran.....	177
3.3 Inovasi.....	180
3.4 Penghargaan.....	186
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	190
4.1 Kesimpulan .....	190
4.2 Rekomendasi.....	191
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Mandat Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	3
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Setda Prov. Jateng Tahun 2023.....	60
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Penunjang Setda Prov. Jateng Tahun 2023.....	62
Tabel 1.4	Dukungan Anggaran.....	63
Tabel 1.5	Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas SAKIP Setda Th.2023.....	70
Tabel 1.6	Langkah Perbaikan Internal Setda Tahun 2023.....	71
Tabel 2.1	Target Kinerja Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023.....	75
Tabel 2.2	Target Kinerja Tujuan, Sasaran Renja Tahun 2023.....	78
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 .....	87
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 .....	92
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun .....	116
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 .....	120
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019-2023.....	123
Tabel 3.4	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan .....	137
Tabel 3.5	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	144
Tabel 3.6	Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.....	152
Tabel 3.7	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	178

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Proses Level.....	54
Gambar 1.2	Peta Proses Relasil.....	55
Gambar 1.3	Peta Sub Proses (Level1).....	56
Gambar 1.4	Struktur Organisasi.....	57
Gambar 2.1	Single Sign On (SSO) Aplikasi GRMS.....	110
Gambar 2.2	Website JDIH Biro Hukum.....	111
Gambar 2.3	Aplikasi Pelita Jateng.....	111
Gambar 2.4	Aplikasi SILALAP BAJA.....	112
Gambar 2.5	E-Consult PBJ.....	112
Gambar 2.6	Goegle Spreadsheet.....	113
Gambar 2.7	PPID Setda Jateng.....	113
Gambar 2.8	Aplikasi E- Layanan Biro Umum.....	114
Gambar 2.9	Silap Onliine Desa.....	114
Gambar 2.10	Silap Online CSR.....	115
Gambar 3.1	SIMONBAJA.....	181
Gambar 3.2	Aplikasi Apik Lakon.....	182
Gambar 3.3	E-SPM.....	182
Gambar 3.4	Aplikasi SEDUNIA.....	183
Gambar 3.5	Aplikasi SIKEJAM.....	184
Gambar 3.6	Aplikasi PANEN.....	184
Gambar 3.7	Aplikasi e-Office.....	185
Gambar 3.8	Penerimaan Penghargaan Terbaik I JDIH Awards Tahun 2023.....	187
Gambar 3.9	Penerimaan Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023.....	187
Gambar 3.10	Piagam Penghargaan Anugrah Adinata Syariah Tahun 2023.....	188
Gambar 3.11	Piagam Penghargaan sebagai Provinsi dengan Transaksi Pengadaan Terbanyak Tahun 2023.....	188
Gambar 3.12	Piagam Penghargaan Bhumandala Award Juara 2 Nasional Kategori Provinsi.....	189
Gambar 3.13	SPM AWARDS Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.....	189

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disampaikan kepada Kepala Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan informasi yang jelas sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023. Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018–2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dan menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang telah ditetapkan dan dengan berorientasi pada hasil dan dampaknya.

Semarang, Februari 2024

**a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

Asisten Administrasi

u.b.

**Kepala Biro Administrasi  
Pembangunan Daerah**

**ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710909 199603 1 006

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai. Sehubungan hal tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya memegang prinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta pelayanan administratif. Sedangkan fungsinya antara lain: pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditetapkan Tujuan "Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dan "Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah" sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program dan kegiatan Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah. Selanjutnya dirumuskan empat Sasaran, yaitu: 1). Meningkatkan Sinergitas Kebijakan Daerah; 2). Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan 4). Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran tersebut serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka pada laporan ini akan menyajikan uraian hasil kinerja empat indikator Tujuan dan dua puluh tiga indikator Sasaran.

Laporan kinerja disusun sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penyajian pelaporan kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap target untuk mengetahui tingkat capaian masing-masing indikator kinerja. Tingkat capaian tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan peningkatan pencapaian kinerja.

## 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

### a. Mandat kinerja

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan penyederhanaan birokrasi yang berimplikasi pada pengalihan sebagian jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional. Selain itu sebagai upaya memenuhi regulasi dari Pemerintah Pusat yaitu Permandagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang kemudian dimutakhirkan menjadi Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 merumuskan mandat kinerja sebagaimana tabel 1.1. berikut.

**Tabel 1.1.  
Mandat Kinerja**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR SUB KEGIATAN</b>
1	Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Efektivitas kerjasama daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah
										Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan APPSI dan FKD MPU
								Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pemerintahan
										Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta
										Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Fasilitasi Penataan Wilayah
									Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
									Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kebijakan pemerintahan dan LKPJ
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan DPRD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM
								Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
				Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Pengelolaan sarana dan prasarana spritual	Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Fasilitasi kelembagaan bina spiritual	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan
										Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji
				Persentase efektifitas produk hukum daerah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
								Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
								Jumlah dokumen kajian produk hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
						Persentase rancangan produk hukum yang kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi		Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I
										Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II
										Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu
										Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara
						Persentase kabupaten/kota peduli HAM		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Fasilitasi Penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota
										Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Makro
								jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Perhubungan
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan		jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Mikro



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Ketercapaian Laba BUMD		Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.	Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan
								Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha		Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi.	Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha
								Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha
						Nilai kemandirian BLUD		Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan BLUD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD	koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BLUD
				Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA		Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi SDA	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian
							Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan
						Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
								Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Provinsi
			Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya			Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota
			Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD			Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota		Penataan Analisis Jabatan		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas		Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD
						Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota
				Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas		Persentase OPD yang nilai SAKIPnya meningkat		Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota
						Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan
						Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
								Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
						Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan
				Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah fasilitasi perencanaan pengadaan barang/jasa
										Jumlah Penyusunan SHB

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitas Pelayanan pengadaan barang/jasa
										Jumlah fasilitas Pengelolaan e katalog lokal
									Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pemantauan dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa
						Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah fasilitas sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitas sistem informasi pendukung pengadaan barang/jasa
									Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi Pengadaan barang/Jasa
						Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terasilitasi	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah fasilitas kelembagaan UKPBJ
									Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa
				Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Capaian Pelaksanaan APBD	Persentase Capaian Pelaksanaan APBD	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD
						Capaian Pelaksanaan APBN	Persentase Capaian Pelaksanaan APBN	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Persentase realisasi bantuan keuangan	Persentase realisasi fisik bantuan keuangan Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II		
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III		



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah
								Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah
						Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai IKM Setda	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM Layanan Biro Umum dan Admiistrasi Pimpinan	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran PD yang disusun
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan aset di SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Rumah Tangga	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Umum
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan meubelair
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin
									Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit pengadaan Aset tetap

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Mebel
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor
										Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah
										Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan KDH - WKDH
									Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya dana penunjang operasional KDH-WKDH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur
										Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wakil Gubernur
									Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Gubernur

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Wakil Gubernur
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Umum
							Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga KDH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga WKDH
								Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan Dokumentasi pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan
									Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi materi pimpinan	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah yang disusun
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan SPBE
							Fasilitasi Keprotokol an	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan keprotokolan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kunjungan tamu KDH dan WKDH
									Pengelolaan Hubungan Keprotokolanan	Jumlah bulan pengelolaan hubungan keprotokolanan
				Nilai IKM Biro Organisasi	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Organisasi
										Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Asisten Administrasi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Organisasi
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Administrasi
						Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah
									Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan
				Nilai IKM Biro Pemotdaker	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Kesejahteraan Rakyat
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Nilai IKM Biro Hukum	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Daerah Biro Hukum
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan DBHCHT

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Nilai IKM Biro Perekonomian	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Perekonomian
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian
				Nilai IKM Biro Isda	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Isda dan Asisten Ekbang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Infrastruktur dan SDA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Ekonomi dan Pembangunan
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan SDA
										Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang di Sosialisasi Ketentuan si Bidang Cukai	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
				Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Pengadaan Barang dan Jasa
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pembangunan Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Pembangunan Daerah
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pembangunan Daerah
		Nilai Sakip Setda	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Setda yg disusun



<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR SUB KEGIATAN</b>
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Setda

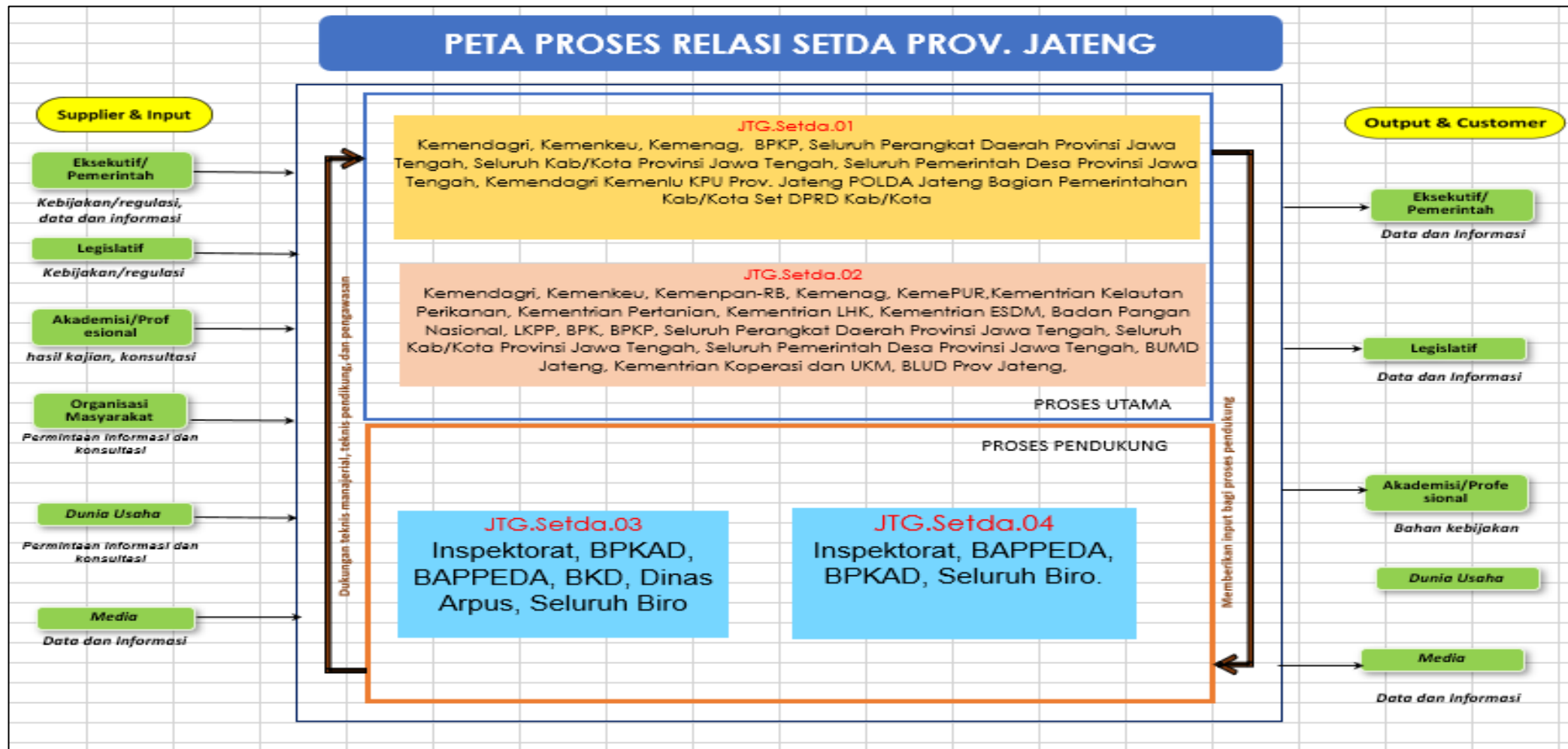
b. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar menghasilkan Output yang bernilai tambah bagi semua pihak. Berikut alur dari Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar di bawah ini:

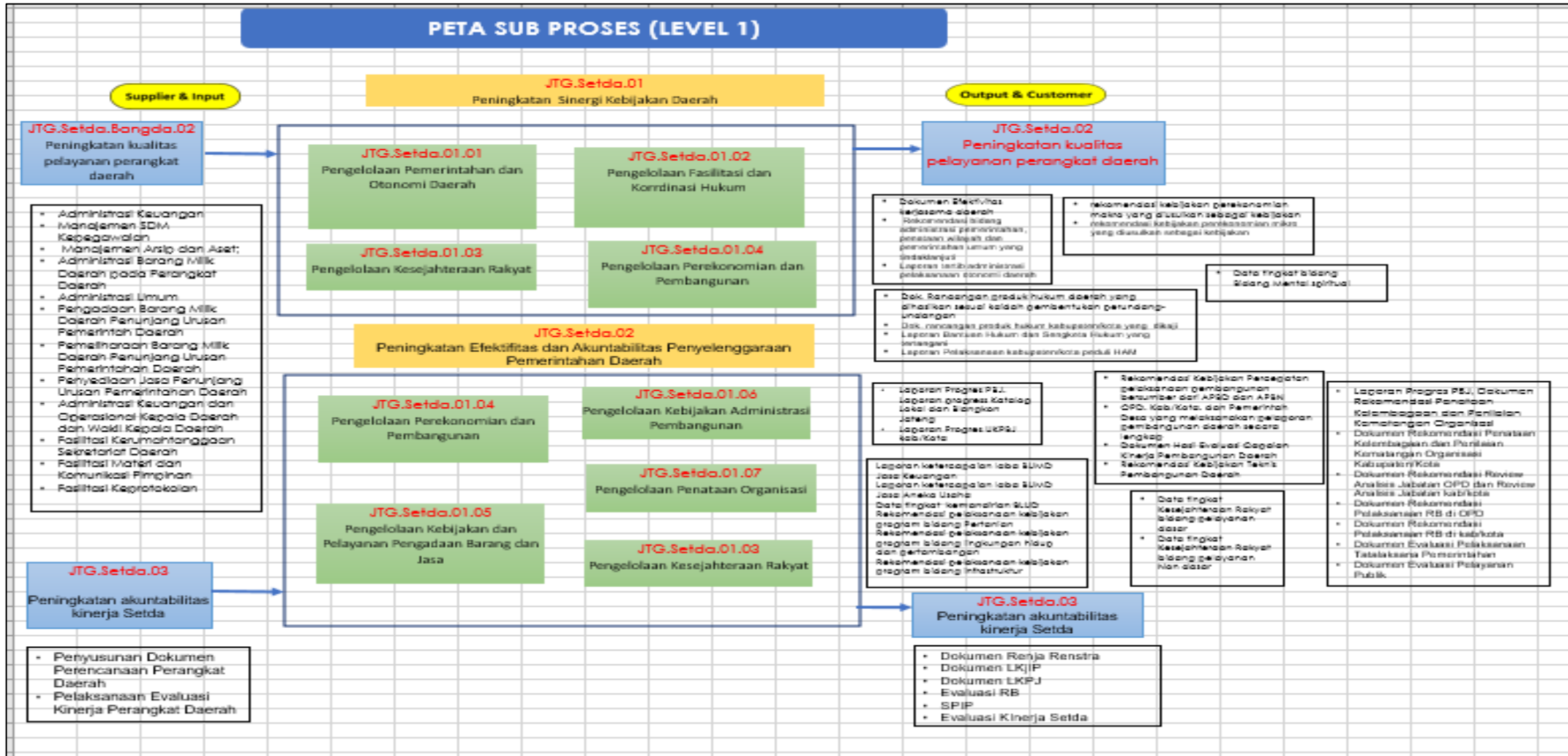
Gambar 1.1 Peta Proses Level



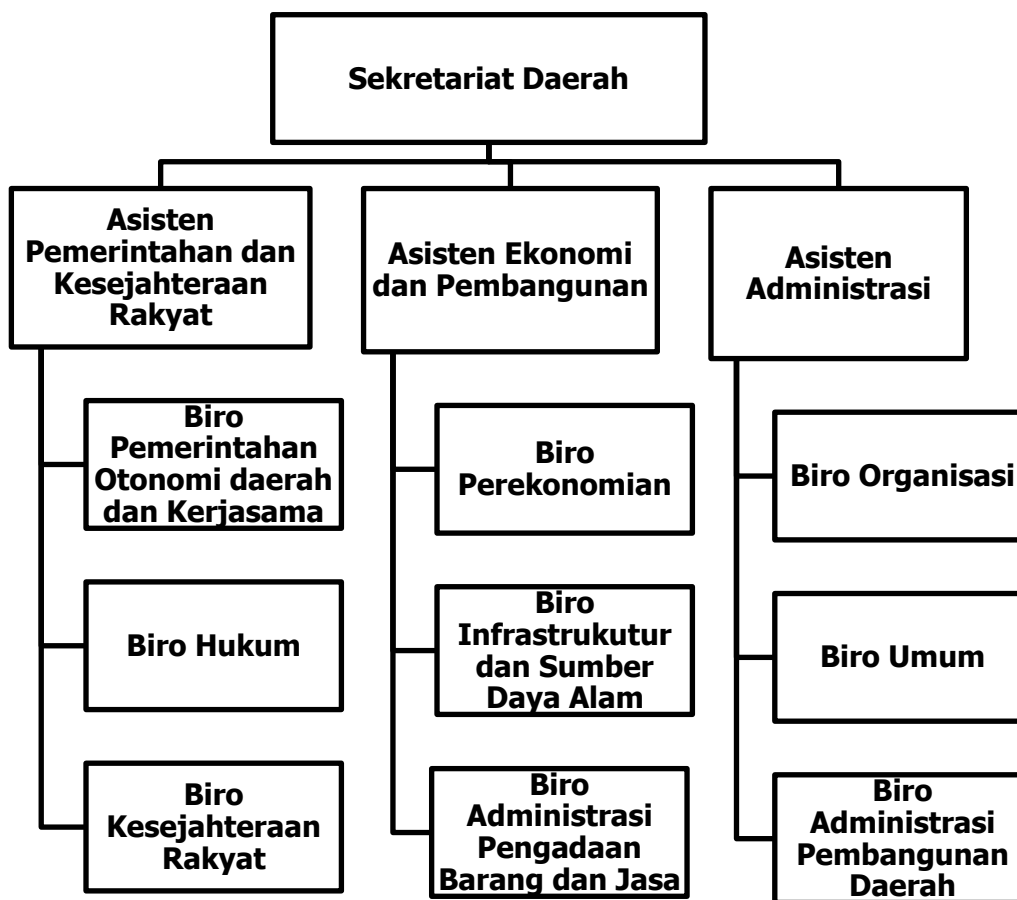
Gambar 1.2 Peta Proses Relasi



Gambar 1.3 Peta Sub Proses (Level 1)



c. Struktur Organisasi



**Gambar 1.4.**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

1.3 Tugas dan Fungsi

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sedangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut:

a. Tugas Sekretariat Daerah

Tugas Sekretariat Daerah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Perangkat Gubernur serta pelayanan administratif.

b. Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Fungsi Sekretariat Daerah antara lain:

- 1). Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
- 2). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- 3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

- 4). Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 5). Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

#### 1.4 Isu-isu Strategis

##### a. Aspek Strategis

Aspek strategis merupakan penjabaran lebih detail dari Tujuan Sekretaris Daerah dengan 58 indikator dan target yang terukur. Dengan demikian aspek tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya sinergitas kebijakan daerah, memiliki 5 indikator kinerja sasaran
- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki 8 indikator kinerja sasaran
- Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, memiliki 9 indikator kinerja sasaran
- Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, memiliki 1 indikator kinerja sasaran.

##### b. Permasalahan Utama

Permasalahan Utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.
- b. Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya
- c. Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel.
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan umum menjadi focus perhatian pemerintah daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik.

## 1.5 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 525 Pegawai Negeri Sipil (data PNS per Desember 2023). Berdasar Jabatan/Eselon terdiri dari Eselon I sebanyak 1 orang, Struktural sebanyak 35 orang, Fungsional sebanyak 132 orang, dan Staf sebanyak 334 orang. Berdasarkan golongan, maka PNS Sekretariat Daerah terdiri dari golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 66 orang, golongan III sebanyak 351 orang dan golongan IV sebanyak 86 orang yang rata-rata mempunyai pengetahuan di bidang Pemerintahan, hukum, informatika, dan manajemen.

Secara rinci data PNS pada per Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.



Tabel 1.2  
Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	STAF
1	Sekretaris Daerah	1						1	0				1	1				
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1						1					1		1			
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	1						1					1		1			
4	Asisten Administrasi	1						0					0		1			
5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama	19	26	0	1	0	25	19	0	0	0	32	13	0	0	3	10	32
6	Biro Hukum	24	18	0	1	2	28	11	0	0	2	34	6	0	0	2	19	21
7	Biro Administrasi Pembangunan	20	8	0	2	0	13	13	0	0	1	19	8	0	0	2	8	18

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	STAF
	Daerah																	
8	Biro Perekonomian	22	18	0	4	7	15	14	0	0	9	23	8	0	0	2	6	32
9	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	18	15	0	3	0	21	9	0	0	1	24	8	0	0	2	10	21
10	Biro Kesra	18	20	0	0	3	23	12	0	0	1	27	10	0	0	1	10	27
11	Biro Organisasi	25	21	0	1	4	24	17	0	0	2	32	12	0	0	3	14	29
12	Biro Umum	107	37	8	52	9	53	20	0	1	42	94	7	0	0	13	7	124
13	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa *)	64	21	0	4	7	52	21	1	0	8	66	11	0	0	7	48	30
	JUMLAH	321	184	8	68	32	254	139	1	1	66	351	86	1	3	35	132	334

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jateng, 31 Desember 2023

b. Sarana dan Prasarana Penunjang

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana tercantum pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Sarana dan Prasarana Penunjang  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

<b>NO.</b>	<b>KODE BIDANG BARANG</b>	<b>NAMA BIDANG BARANG</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>
1	2	3	4
1	1.3.1.01	TANAH	15
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	41
4	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	315
5	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	19
6	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-
7	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	8.630
8	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.669
9	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	13
10	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-
	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	8
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	1.927
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	23
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	44
22	1.3.3.02	MONUMEN	-
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	-

<b>NO.</b>	<b>KODE BIDANG BARANG</b>	<b>NAMA BIDANG BARANG</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>
27	1.3.4.03	INSTALASI	-
28	1.3.4.04	JARINGAN	-
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	10.747
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/ KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	52
31	1.3.5.03	HEWAN	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-

Sumber : Biro Umum Setda Prov. Jateng, 31 Desember 2023

Untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung 8 Program , 47 indikator Program dengan anggaran sebesar Rp. 675.016.997.000,-, Sebagaimana tabel 1.4. sebagai berikut:

Tabel 1.4.  
Dukungan Anggaran

<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>		<b>3.803.006.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		685.806.000
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	275.000.000
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem	410.806.000
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		3.117.200.000
	Capaian Pelaksanaan APBD	750.700.000
	Capaian Pelaksanaan APBN	423.500.000
	Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	799.000.000

<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
	Persentase realisasi bantuan keuangan	997.000.000
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	147.000.000
<b>BIRO HUKUM</b>		<b>4.220.707.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		901.707.000
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	901.707.000
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		3.319.000.000
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	1.174.000.000
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	795.000.000
	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	965.000.000
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	385.000.000
<b>BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM</b>		<b>5.235.939.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		1.319.439.000
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	1.319.439.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		3.916.500.000
	Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	900.000.000

<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
	Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	611.300.000
	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	2.405.200.000
<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>441.239.749.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		540.259.000
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	540.259.000
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		440.699.490.000
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	1.025.000.000
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	1.277.500.000
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	438.396.990.000
<b>BIRO ORGANISASI</b>		<b>2.850.000.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		594.300.000
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	185.000.000
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	409.300.000
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		2.255.700.000
	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	412.000.000
	Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	355.000.000

<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
	Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	397.000.000
	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	229.550.000
	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	200.150.000
	Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	271.000.000
	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	226.157.000
	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	164.843.000
<b>BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA</b>		<b>4.948.206.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		696.076.000
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	696.076.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		4.252.130.000
	Efektivitas kerjasama daerah	1.670.450.000
	Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	241.200.000
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	1.340.790.000
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	1.240.890.000
	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	300.000.000

<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		<b>4.065.000.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		400.999.000
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	400.999.000
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		3.664.001.000
	Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	920.000.000
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	2.049.527.000
	Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terasilitasi	694.474.000
<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>		<b>3.322.996.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		294.980.000
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	294.980.000
PROGRAM PEREKONOMIAND ANPEMBANGUNAN		3.028.016.000
	Nilai kemandirian BLUD	83.016.000
	Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	300.000.000
	Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	1.450.000.000
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	480.000.000
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	715.000.000



<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>BIRO UMUM</b>		<b>205.331.394.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		205.331.394.000
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	19.917.000.000
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	154.994.657.000
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	30.419.737.000
<b>TOTAL</b>		<b>675.016.997.000</b>

#### 1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, tindak lanjut LHE SAKIP 2023 dan langkah perbaikan internal.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

###### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 – 2023;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

**B. Realisasi Anggaran**

Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**Lampiran:**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain

**1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Catatan Hasil Reviu (CHR) atas SAKIP Setda tahun 2023 dan hasil yang telah diperoleh sebagaimana tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5  
Rencana Tindak Lanjut (RTL) Catatan Hasil Reviu (CHR)  
atas SAKIP Setda tahun 2023

<b>NO.</b>	<b>CATATAN HASIL REVIU (CHR) ATAS SAKIP SETDA 2023</b>	<b>RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)</b>	<b>HASIL</b>
1.	PPID Setda Provinsi agar mengunggah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Dokumen Perencanaan Anggaran Setda Provinsi Jawa Tengah di Web	Website PPID Setda mulai Tahun 2024 akan dilakukan perbaikan sesuai catatan hasil reviu SAKIP dan surat	Website PPID Setda sudag ada data Dokumen Perencanaan, Perjanjian Kinerja, Dokumen

NO.	CATATAN HASIL REVIU (CHR) ATAS SAKIP SETDA 2023	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	HASIL
	<a href="http://ppidsetda.jatengprov.go.id">http://ppidsetda.jatengprov.go.id</a>	komitmen untuk melaksanakan perbaikan	Perencanaan Anggaran
2.	Berkoordinasi dengan Kepala Biro Organisasi untuk memastikan ketepatan waktu dan kualitas dokumen LKjIP sesuai Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/6 tanggal 4 Januari 2023 tentang Penyusunan LKjIP Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024. Apabila terdapat pengunduran batas waktu pengumpulan dokumen LKjIP, dapat menyusulkan surat dinas secara resmi	Akan dilaksanakan sosialisasi LKjIP, PK, dan IKI ke seluruh OPD Bulan Januari 2024	Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sekretariat Daerah Nomor: 051.2/151 perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, RKT Tahun 2025 Nomor 051
3.	Membuat kriteria penghargaan pegawai/sub unit kerja yang berkinerja untuk mengukur dan menyimpulkan unit kerja yang berkinerja baik/ cukup/ kurang/ gagal serta sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi unit kerja dan individu	Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> mengacu pada surat edaran BKD tanggal 24 Januari 2024 No. 800.1.12.8/216 tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Diimplimentasikan tahun 2024

### 1.8 Langkah Perbaikan Internal

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan Langkah perbaikan internal atas rekomendasi LKjIP Sekretariat Daerah tahun 2022 sebagaimana tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.6  
Langkah Perbaikan Internal Setda Tahun 2023

NO	SARAN LKjIP 2022	TINDAK LANJUT
1.	Biro-Biro melakukan pemetaan dan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang mengikuti perkembangan situasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui optimalisasi peran Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkup Setda	Rakor, FGD dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan
2.	Biro-Biro meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan SKPD teknis dan stakeholders lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renstra Setda 2024-2026 dan Penyusunan Renja Setda 2024</li> <li>• Biro-biro juga telah melaksanakan FGD sesuai bidang yang diampu</li> </ul>
3.	Biro-Biro meningkatkan efektifitas koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi agenda biro dengan SKPD teknis guna menuntaskan target kinerja indikator daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah tahun 2023 sebagai akhir RPJMD	Koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dengan SKPD teknis sesuai agenda untuk mencapai kinerja perangkat daerah.
4.	Biro-Biro melaksanakan agenda dan kebijakan pembangunan yang bersinergi dengan agenda dan kebijakan Pemerintah pusat yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah	Rakor, FGD dengan Pemerintah Pusat atau instansi vertikal di daerah
5.	Biro-Biro meningkatkan pengendalian terhadap kinerja SKPD teknis melalui optimalisasi pemanfaatan <i>E-Controlling</i> Kinerja sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBD dan Capaian Kinerja TW I – IV Biro-biro Lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah.
6.	Biro-Biro mengoptimalkan pemanfaatan E-Controlling APBD sebagai instrumen pengendalian penggunaan anggaran agar program dan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBD dan Capaian Kinerja TW I – IV Biro-biro Lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah

<b>NO</b>	<b>SARAN LKjIP 2022</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
7.	Biro-Biro melaksanakan agenda-agenda yang mampu mendukung target kinerja Program dan Kegiatan serta dapat mengungkit kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	Rakor Biro dengan OPD teknis dalam rangka pencapaian kinerja OPD dan Daerah

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD**

Guna mewujudkan visi-misi Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023, diperlukan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah khususnya melalui pengoordinasian pelaksanaan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut merupakan instrumen pengendalian atas upaya pencapaian target-target pembangunan, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut diatas menuntut sinergitas perencanaan strategis Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

##### **1. Visi-Misi**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berperan penting dalam mewujudkan efektivitas manajemen pemerintahan daerah menuju Visi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

#### **Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari** **"Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"**

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan *guyub* untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah mendukung pencapaian visi-misi dari Kepala Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai kordinator kebijakan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah mendukung perwujudan melaksanakan reformasi birokrasi yang mampu merespon, memfasilitasi, dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat Daerah mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah melalui peningkatan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Guna mewujudkan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, melalui Renstra 2018-2023 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan tujuan sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program kegiatan Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah, yaitu:

### **"Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah"**

Secara teknokrasi selanjutnya dirumuskan empat Sasaran untuk mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah,
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, dan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran beserta targetnya tahun 2019-2023 yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018 – 2023 seperti tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1.

**Target Kinerja Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Indikator pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah						
	Persentase Kebijakan yang Efektif	80	80	81	83	84
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	75	81	83	84
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	76	76	78	79
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah						
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85	85	85	85	85
	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	85	85	85	85
	Persentase kerjasama dalam negeri & luarnegeri yang efektif	70	70	80	85	90
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	85	80	85	85	85
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	90	93	91	93	94
	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	90	93	92	93	94
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	81	87	92	93	94
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80	75	83	84	85
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80	82	82	84	85



TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Indikator pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80	81	82	83	84
	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	90	90	91	93	94
	Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	90	90	91	93	94
	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	90	90	91	93	94
	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	19	29	22	28	31
	Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	52,1	70	64	89	100
	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	73	78	78	87	92
	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	25	50	40	70	85
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	80	70	84	92	96
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	82	85	85	85	85
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85	70	89	93	95
	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60	30	65	67	70
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85	71	85	85	85
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	80	70	84	92	96
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100	80	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85	80	85	85	85

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Indikator pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	80	100	100	100
	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100	100	100
	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah						
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	75	76	77	78	79

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dipengaruhi oleh adanya dinamika kebijakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disusun guna memecahkan permasalahan dan menangani berbagai isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah antara lain mewujudkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, maka dirumuskan ulang Tujuan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Tujuan pertama, Meningkatkan Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dirumuskan dua sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah, dan
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan Tujuan kedua, Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dirumuskan dua sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, dan

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Guna mendukung terciptanya sinergitas pembangunan nasional dan daerah tersebut, Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 akan melaksanakan 8 program, yaitu:

- a. Program Administrasi Umum.
- b. Program Penataan Organisasi.
- c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- d. Program Kesejahteraan Rakyat.
- e. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum.
- f. Program Perekonomian Dan Pembangunan.
- g. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa.
- h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran yang digunakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terangkum dalam tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Target Kinerja Tujuan, Sasaran Renja Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah					
	Nilai Sakip Setda			%	73,97
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah					
	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah			%	100
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
			Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah					
	Nilai IKM Setda			%	78,5

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah					
	Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan			%	78,5
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem	%	100
	Nilai IKM Biro Hukum			%	78,5
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%	100
	Nilai IKM Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam			%	78,5
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	%	100
	Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat			%	78,5
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	%	100
	Nilai IKM Biro Organisasi			%	78,5
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	%	100
	Nilai IKM Biro Pemotdaker			%	78,5
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	%	100
	Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa			%	78,5
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	%	100
	Nilai IKM Biro Perekonomian			%	78,5
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100
	Nilai IKM Layanan Biro Umum			%	78,5
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
			Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan					

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemerintahan Daerah					
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah			%	85
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
	Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah			%	89
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
			Capaian Pelaksanaan APBD	%	98,50
			Capaian Pelaksanaan APBN	%	95,5
			Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	85
			Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85,00
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100
	Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa			%	90
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	90
			Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	95
			Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terasilitasi	%	92
	Ketercapaian Laba BUMD			%	75
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Nilai kemandirian BLUD	%	55
			Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	80,00
			Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	85,00
	Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat			%	90
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	95
			Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	95
	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA			%	90

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PROGRAM PEREKONOMIAND ANPEMBANGUNAN			
			Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	96
			Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	95
			Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	90
	Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas			%	87,76
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
			Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%	91,42
			Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%	95,92
	Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas			%	85,37
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
			Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	100
			Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%	85,37
			Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	%	85,63



Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang			%	85,37
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
			Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	%	87,8
			Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	80
			Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	34,15
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
	Persentase Kebijakan yang Efektif			%	80
Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah					
	Efektifitas kebijakan perekonomian daerah			%	78
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	82,00

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	77
	Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah			%	90
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
			Efektivitas kerjasama daerah	%	95,00
			Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	90,00
			Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95,00
	Persentase efektifitas produk hukum daerah			%	96
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
			Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	100
			Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	%	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum			%	96
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
			Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%	100
			Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96,00
	Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan			%	45
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	42

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan target kinerja tahun 2023 sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 seperti pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA</b>				
1	Meningkatnya Kualitas Kerjasama Daerah	Efektivitas kerjasama daerah		
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	90
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95
4	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100
<b>BIRO HUKUM</b>				
1	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota	Persentase rancangan produk hukum yang kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	%	100
3	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%	100
4	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96
5	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%	100
<b>BIRO ORGANISASI</b>				
1	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD		87,8
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%	91,42
3	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	80
4	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	100
5	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya		34,15
6	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%	95,92
7	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%	85,37
8	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	%	85,63
9	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Meningkatnya efektifitas Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	%	100
<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				
1	Meningkatnya efektivitas pembangunan urusan pelayanan dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%	95
2	Meningkatnya efektivitas pembangunan urusan non pelayanan dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%	95
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	42
4	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100
<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>				
1	Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	82
2	Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	77
3	Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha	Persentase ketercapaian laba BUMD Aneka Usaha	%	80
4	Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan	Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Keuangan	%	85
5	Meningkatkan capaian kinerja BLUD	Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55
6	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Perekonomian	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100
<b>BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA</b>				
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang pertanian	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	90
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi ESDM, lingkungan hidup dan kehutanan	Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	95

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	96
4	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	%	100
<b>BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>				
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	95
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	90
3	Meningkatnya Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	%	92
4	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Adm Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adm Pengadaan Barang dan Jasa	%	100
<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
1	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang administrasi pembangunan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Capaian Pelaksanaan APBD	%	98,5
		Capaian Pelaksanaan APBN	%	95,5
		Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85
		Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	85
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Adm. Bangda	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adm. Bangda	%	100
<b>BIRO UMUM</b>				
1	Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	%	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100

Pada Tahun 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 8 program, 41 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp. 675.016.997.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima milyar enam belas juta sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Program dan Anggaran digunakan untuk mendukung capaian Tujuan dan Sasaran, sedangkan rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.4.

Tabel 2.4  
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BIRO ADM. BANGDA</b>					<b>3.803.006.000</b>



<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					<b>3.117.200.000</b>
		Capaian Pelaksanaan APBD	%	98,5	750.700.000
		Capaian Pelaksanaan APBN	%	95,5	423.500.000
		Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	997.000.000
		Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	85	799.000.000
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100	147.000.000
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1.869.700.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	3	449.200.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	2	423.500.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	8	372.250.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	8	365.250.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	8	259.500.000
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				946.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	215.500.000
		Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	90	583.500.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Laporan	4	147.000.000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>					<b>685.806.000</b>
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100	275.000.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adm Bangda	%	100	410.806.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				275.000.000
		Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	Dokumen	6	275.000.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				410.806.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan	Dokumen	2	410.806.000
<b>BIRO HUKUM</b>					<b>4.220.707.000</b>
<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>					<b>3.319.000.000</b>
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	100	1.174.000.000
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	%	100	795.000.000
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	385.000.000
		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%	100	965.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				1.969.000.000
		Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	12	462.000.000
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	12	110.000.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	12	602.000.000
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	795.000.000
	Fasilitasi Bantuan Hukum				1.350.000.000
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	12	965.000.000
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	12	385.000.000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>					901.707.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%	100	901.707.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				650.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	650.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				251.707.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum	Dokumen	2	251.707.000
<b>BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA</b>					<b>5.235.939.000</b>

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					<b>3.916.500.000</b>
		Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	96	900.000.000
		Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	95	611.300.000
		Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	90	2.405.200.000
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				3.916.500.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen	2	500.000.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	400.000.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	2	302.500.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2	308.800.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	252.600.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	2	252.600.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	3	1.900.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					1.319.439.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	%	100	1.319.439.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				800.000.000
		Jumlah Orang Yang di Sosialisasi Ketentuan si Bidang Cukai	Orang	8000	800.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				519.439.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang	Laporan	4	519.439.000
<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					<b>441.239.749.000</b>
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					<b>440.699.490.000</b>
		Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	95	1.025.000.000
		Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	95	1.277.500.000
		Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	42	438.396.990.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				1.025.000.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	3	408.546.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	3	296.454.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	3	320.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				1.277.500.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	Dokumen	3	302.500.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dokumen	3	672.500.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi kependudukan	Dokumen	4	302.500.000
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				438.396.990.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	3	434.236.115.000
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	3	4.160.875.000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>					<b>540.259.000</b>
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	%	100	540.259.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				540.259.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	2	540.259.000
<b>BIRO ORGANISASI</b>					<b>2.850.000.000</b>
<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>					<b>2.255.700.000</b>
		Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%	91,42	226.157.000
		Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%	95,92	164.843.000
		Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	100	412.000.000
		Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%	85,37	355.000.000
		Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	%	85,63	397.000.000



<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	%	87.8	229.550.000
		Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	80	200.150.000
		Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	34.15	271.000.000
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				1.555.000.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	3	226.157.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	8	164.843.000
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2	412.000.000
		Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2	355.000.000
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2	397.000.000
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				700.700.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	2	229.550.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian	Dokumen	4	200.150.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota			
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	2	271.000.000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>					<b>594.300.000</b>
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	%	100	185.000.000
		Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	409.300.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				409.300.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Laporan	4	409.300.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				185.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	4	185.000.000
<b>BIRO PEMERINTAH OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA</b>					<b>4.948.206.000</b>
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>					<b>4.252.130.000</b>
		Efektivitas kerjasama daerah	%	95	1.670.450.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	90	1.340.790.000
		Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	1.240.890.000
	Fasilitasi Kerjasama Daerah				1.670.450.000
		Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95	954.655.000
		Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95	241.200.000
		Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95	474.595.000
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				1.340.790.000
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	10	1.340.790.000
	Pelaksanaan Otonomi Daerah				1.240.890.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	223.890.000
		Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	95	717.000.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	300.000.000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>					<b>696.076.000</b>
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	%	100	696.076.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				696.076.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra	Dokumen	4	696.076.000
<b>BIRO ADM PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					<b>4.065.000.000</b>
<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					<b>3.664.001.000</b>
		Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	90	920.000.000
		Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	95	2.049.527.000
		Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi	%	92	694.474.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				920.000.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	920.000.000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				2.049.527.000
		Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	5	2.049.527.000
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				694.474.000
		Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	694.474.000
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					400.999.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	%	100	400.999.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				400.999.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	400.999.000
<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>					<b>3.322.996.000</b>
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					3.028.016.000
		Nilai kemandirian BLUD	%	55	83.016.000
		Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	80	300.000.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	85	1.450.000.000
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	82	480.000.000
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	77	715.000.000
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				1.833.016.000
		Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD	Dokumen	2	47.038.000
		Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	35.978.000
		Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	Dokumen	2	125.000.000
		Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha	Dokumen	3	175.000.000
		Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	2	150.000.000
		Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	4	1.300.000.000
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				1.195.000.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	2	220.000.000
		jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	2	260.000.000
		jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	2	330.000.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	3	385.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					294.980.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100	294.980.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				294.980.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian	Laporan	2	294.980.000
<b>BIRO UMUM</b>					<b>205.331.394.000</b>
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					205.331.394.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	19.917.000.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	%	100	154.994.657.000

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	30.419.737.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				9.700.873.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas	Laporan	12	80.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga	Laporan	12	9.595.873.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	25.000.000
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				17.916.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan	Laporan	12	17.566.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi materi pimpinan	Laporan	12	350.000.000
	Fasilitasi Keprotokolan				1.921.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan	Laporan	12	1.921.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				87.557.293.000



<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	87.557.293.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				677.500.000
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	677.500.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				30.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	12	30.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18.983.192.000
		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	18.983.192.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.357.538.000
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan	Laporan	12	30.000.000
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	24.327.538.000

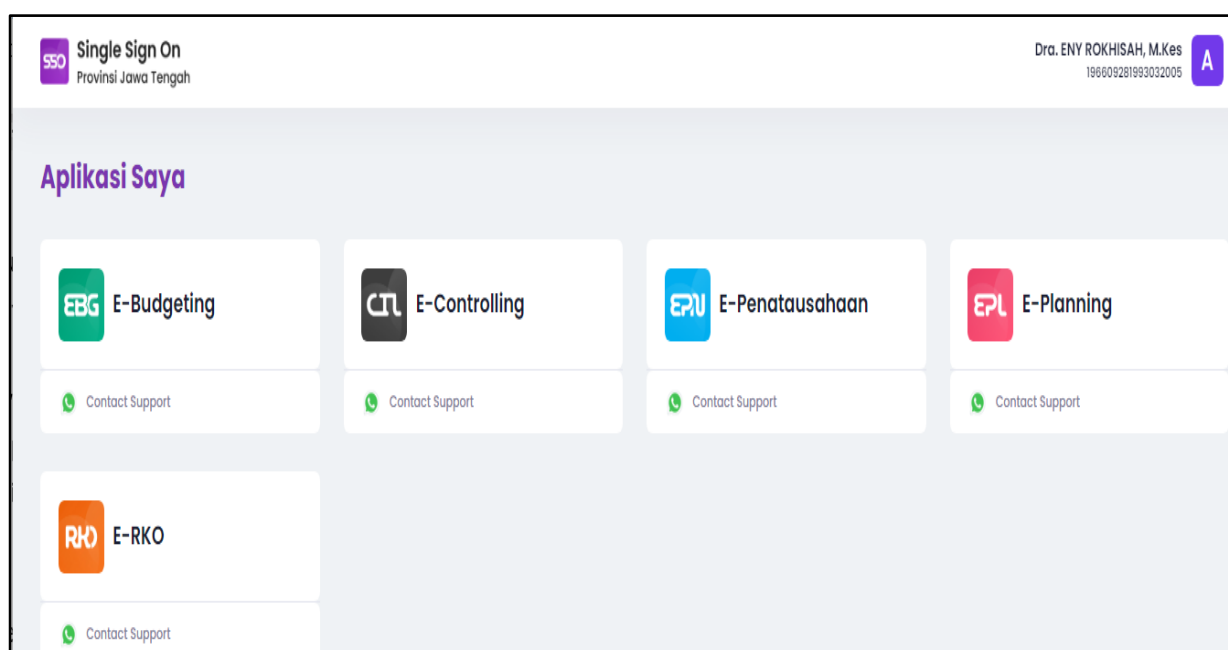
<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.011.935.000
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	11.011.935.000
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				27.318.864.000
		Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT	Laporan	12	27.108.864.000
		Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan	Laporan	12	210.000.000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				5.857.199.000
		Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur	Laporan	12	3.250.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Laporan	12	1.100.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur	Laporan	12	1.507.199.000
<b>TOTAL</b>					<b>675.016.997.000</b>

## 2.4 Intrumen Pendukung Capaian Kinerja

Penerapan *e-Government* bertujuan untuk mempersingkat proses kerja birokrasi Pemerintah dan memungkinkan adanya transparansi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Maka untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah didukung oleh *Government Resources Management System (GRMS)* yang memuat beberapa aplikasi antara lain e-budgeting, e-planning, e-RKO, epenatausahaan, e-delivery dan e-controlling yang mendukung seluruh proses kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dari Aplikasi tersebut Biro Administrasi Pembangunan Daerah sebagai Penyusun Program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengakses semua Biro Lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah.

**Gambar 2.1**  
**Single Sign On (SSO) Aplikasi GRMS**



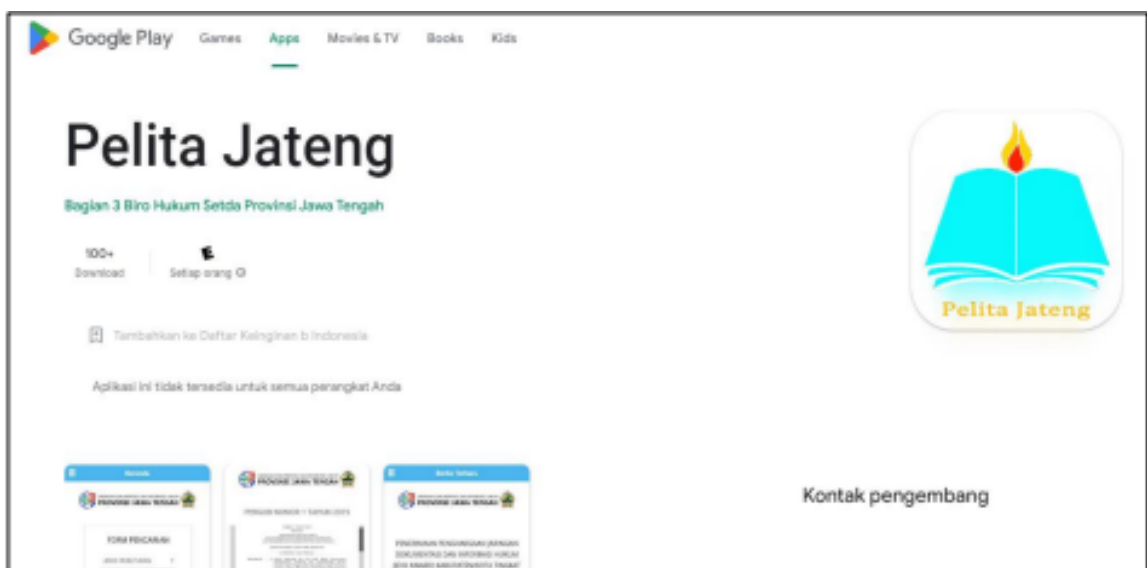
Selain Single Om (SSO) Aplikasi GRMS, beberapa Biro lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai aplikasi lain sebagai pendukung kinerja, diantaranya adalah:

1. Biro Hukum

**Gambar 2.2**  
**Website JDIH Biro Hukum**



**Gambar 2.3**  
**Aplikasi Pelita Jateng**



2. Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
- a. SILALAP BAJA berfungsi untuk modernisasi proses layanan administrasi pengadaan barang/jasa, proses review dokumen tender SKPD, dan pendaftaran akun SPSE penyedia baru.

**Gambar 2.4**  
**Aplikasi SILALAP BAJA**



[\(https://silalapbaja.biroabpj.jatengprov.go.id/\)](https://silalapbaja.biroabpj.jatengprov.go.id/)

- b. E-Consult berfungsi sebagai fasilitasi konsultasi pengadaan barang/jasa untuk penyedia dan SKPD.

**Gambar 2.5**



[\(http://konsultasi.biroapbj.jatengprov.go.id/\)](http://konsultasi.biroapbj.jatengprov.go.id/)

3. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam  
Memiliki google spreadsheet yang berguna untuk pencatatan agenda kegiatan dan rapat yang diakses secara real-time oleh pengguna akses dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar 2.6

JADWAL KEGIATAN HARIAN BIRO ISDA 2022											
JADWAL BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA											
MATERI	KABUPATEN/KOTA	PENGIRIM		NOMOR AGENDA	KLASIFIKASI	WAKTU	TEMPAT	ACARA	DISPOSISI	YANG MENGHADIRI	CATATAN/KETERANGAN
		EKSTERNAL	INTERNAL								
2022											
2023											
1819			KPKP2		SURAT KELUAR	16.00	R Pertemuan Ged B Dsnakosowan	Ronbug Utama KTNA Provinsi Jawa Tengah dengan peserta KTNA, Kab/Kota se Jawa Tengah		KPKP2	
1820	Rabu, 1 Februari		KPKP2		SURAT KELUAR	Langituan	R Pertemuan Ged B Dsnakosowan	Ronbug Utama KTNA Provinsi Jawa Tengah dengan peserta KTNA, Kab/Kota se Jawa Tengah		KPKP2	
1821	Rabu, 1 Februari	Sekretariat Daerah Prov. Jateng		77	UNDANGAN	07.30	Gedung Gradika Bnabik Praja	Tausiyah oleh Drs. H. Widyanto	INFRAS, LHKESDM, K PKP2		
1822	Rabu, 1 Februari	Sekretariat Daerah Prov. Jateng		59	UNDANGAN	08.30	Taman Budaya Jawa Tengah, Jl. Ir. Sutami No. 57 Jabris, Surakarta	Sosialisai APED dan APBN Bidang Infrastruktur TA. 2023	INFRAS		hadir bersama saya, yg tgl 27 koord. Amak hadir mewakili saya, peminon saya ada palantikan
1823	Rabu, 1 Februari	Sekretariat Daerah Prov. Jateng		84	UNDANGAN	09.00	R.R Organisasi	Peaksanaan Orientasi Tugas CPNS lantikan IPDN	SUBBAG TU		Hadri
	Rabu, 1 Februari						Dusun Dsnar Pori	Sosialisai Juknis dan DPKP2 IKD TA 2023			

- 4. Biro Umum
  - a. PPID Setda Jateng

Gambar 2.7



- b. Aplikasi e- layanan Biro Umum
 

E-Layanan Aplikasi untuk peminjaman Gedung, ruang rapat, venue kepada masyarakat/SKPD yang dikelola oleh Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, <http://biroumum.jatengprov.go.id/layanan/>.

**Gambar 2.8**



- 5. Biro Kesejahteraan
  - a. Silap Online Desa Dampungan

**Gambar 2.9**  
**Silap Online Desa**



b. Silap Online CSR

**Gambar 2.10**  
**Silap Online CSR**





## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2023 merumuskan 4 (empat) target kinerja pada level Tujuan dan 23 (dua puluh tiga) target kinerja pada level sasaran. Seluruh indikator target kinerja tersebut dikelompokkan dalam empat rumusan kinerja Sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah.

Evaluasi capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) rentang capaian dan kategori sebagai berikut:

#### Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 91 %	Sangat Baik
2.	76 % sampai dengan 99,99 %	Baik
3.	66 % sampai dengan 75,99 %	Cukup
4.	51 % sampai dengan 65,99 %	Kurang
5.	Kurang dari 50,99 %	Sangat Kurang

Berikut uraian capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80	85,84	107,30	80
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	89,12	104,85	85

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD
	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	%	90	100	111,11	90
		Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	45	45	100,00	45
		Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	78	78,57	100,73	96
		Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	96	100	104,17	96
		Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	%	96	100	104,17	78
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	89	93,7	105,28	82
		Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	%	85,37	100	117,14	85,37
		Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas	%	87,76	91,83	104,64	87,76
		Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	85,37	90,24	105,70	85,37
		Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	92,53	102,81	90

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD
		Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang bidang SDA	%	82	84	102,44	90
		Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	90	90	100,00	89
		Ketercapaian Laba BUMD	%	75	98,17	130,89	75
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai IKM Setda	%	78,5	86,15	109,75	78,5
		Nilai Sakip Setda	%	73,97	79	106,80	73,97
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	78,50	88,5	112,74	78,50
		Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	%	78,50	86,75	110,51	78,50
		Nilai IKM Biro ISDA	%	78,50	81,75	104,14	78,50
		Nilai IKM Biro Perekonomian	%	78,50	88,75	113,06	78,50
		Nilai IKM Biro Hukum	%	78,50	83,5	106,37	78,50
		Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	%	78,50	86,5	110,19	78,50
		Nilai IKM Biro Pemotdaker	%	78,50	83	105,73	78,50
		Nilai IKM Biro Organisasi	%	78,50	82,75	105,41	78,50
		Nilai IKM Layanan Biro Umum	%	78,50	81,82	104,23	78,50
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	%	100	100	100,00	100

### 3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Jawa Tengah Tahun 2023

Tujuan Sekretariat Daerah Jawa Tengah tahun 2023 dengan 4 indikator seluruhnya tercapai dalam kategori "sangat baik". Indikator pertama, Persentase Kebijakan yang Efektif dengan capaian sebesar 107,30%. Faktor utama ketercapaian indikator tersebut yaitu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah antara lain dalam bidang perekonomian yang mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Indikator kedua, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 104,85%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari efektifnya pengendalian kinerja perangkat daerah oleh Biro lingkup Setda sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan di Jawa Tengah. Indikator ketiga, Nilai IKM Setda dengan capaian sebesar 109,75% menunjukkan adanya perbaikan layanan umum yang diberikan Sekretariat Daerah terhadap pengguna layanan dan indikator keempat, Nilai Sakip Setda dengan capaian 106,80%, menunjukkan proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Setda dilaksanakan dengan sangat baik.

Sasaran pertama "Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah" dengan 5 indikator, seluruhnya tercapai dalam kategori "sangat baik". Adapun agenda yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut antara lain: 1). Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dengan pihak ketiga Dalam Negeri; 2). Pengelolaan Hibah Bidang Pendidikan keagamaan; 3). Penyusunan Ringkas kebijakan (*policy brief*) Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 4). Pembahasan Dalam Rangka Sinkronisasi dan Harmonisasi Raperda; dan 5). Pengkajian berkas penanganan perkara.

Sasaran kedua "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan 8 indikator, seluruhnya tercapai dalam kategori "sangat baik" dan 1 indikator dalam kategori "baik". Adapun agenda yang mendukung sasaran strategis tersebut antara lain: 1). Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD; 2). Fasilitasi dan koordinasi penilaian kematangan organisasi OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3). Pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota; 4). Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng dan Kabupaten/Kota; 5). Fasilitasi pelayanan pengadaan barang/jasa baik secara

tender, seleksi atau penunjukan langsung; 6). Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah bidang sosial; dan 7). Koordinasi, monitoring dan evaluasi BUMD Jawa Tengah.

Sasaran ketiga "Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah" dengan 9 indikator yang tercapai seluruhnya dalam kategori "sangat baik". Adapun agenda yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah survei kepuasan publik secara periodik triwulanan dan terintegrasi untuk mengetahui hal-hal yang perlu adanya perbaikan yang dilaksanakan oleh seluruh Biro-Biro lingkup Sekretariat Daerah.

Sasaran keempat "Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah" dengan 1 indikator yang tercapai dalam kategori "sangat baik". Adapun agenda yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Renja Setda Tahun 2023, penyusunan dokumen perencanaan Setda dan evaluasi kinerja Biro-Biro lingkup Sekretariat Daerah secara periodik triwulanan. Tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80	85,84	107,30	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	89,12	104,85	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	%	90	100	111,11	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
		Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	45	45	100,00	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
		Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	78	78,57	100,73	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data	
		Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	96	100	104,17	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja	
		Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	%	96	100	104,17	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja	
	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	89	93,7	105,28	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja	
			Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	%	85,37	100	117,14	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
			Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas	%	87,76	91,83	104,64	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
			Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	85,37	90,24	105,70	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
			Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	92,53	102,81	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
			Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang bidang SDA	%	82	84	102,44	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
			Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat		90	90	100,00	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
			Ketercapaian Laba BUMD	%	75	98,17	130,89	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
2			Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai IKM Setda	%	78,5	86,15	109,75	Sangat Baik
	Nilai Sakip Setda	%		73,97	79	106,80	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	78,50	88,5	112,74	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja	
		Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	%	78,50	86,75	110,51	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
		Nilai IKM Biro ISDA	%	78,50	81,75	104,14	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
		Nilai IKM Biro Perekonomian	%	78,50	88,75	113,06	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
		Nilai IKM Biro Hukum	%	78,50	83,5	106,37	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
		Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	%	78,50	86,5	110,19	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
		Nilai IKM Biro Pemotdaker	%	78,50	83	105,73	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
		Nilai IKM Biro Organisasi	%	78,50	82,75	105,41	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
		Nilai IKM Layanan Biro Umum	%	78,50	81,82	104,23	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	%	100	100	100,00	Sangat Baik	e-Controlling Kinerja

### 3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (selama 5 tahun)

Seluruh indikator Tujuan dan Sasaran tahun 2019 – 2023 seluruhnya dalam kategori “sangat baik”. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 sangat berpengaruh pada kebijakan dan pelaksanaan manajemen pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Anggaran difokuskan untuk mengatasi dampak Covid-19 di bidang Kesehatan dan Perekonomian. Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan di Jawa Tengah sejak akhir tahun 2021. Selain itu, mulai tahun 2022 ditetapkan cascading kinerja baru sebagai implikasi adanya Permandagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang kemudian dimutakhirkan menjadi Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja Sekretariat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	<b>Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah</b>																
		Persentase Kebijakan yang Efektif	80	93,02	116,28	80	86,08	107,6	82	92,05	112,26	80,43	87,38	108,64	80	85,84	107,30
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	86,36	107,95	75	83,13	110,84	82	83,77	102,16	85	86,5	101,76	85,00	89,12	104,85
		Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	75,63	100,84	76	77,5	101,97	77	82,75	107,47	Na	Na	Na	Na	Na	Na
	<b>Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah</b>																



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85	100	117,65	85	100	117,65	85	100	117,65	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Prosentase Hail Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	100	117,65	85	100	117,65	85	100	117,65	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70	71	101,43	70	70	100	80	80	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	85	85,71	100,84	80	80,65	100,81	85	87,1	102,47	Na	Na	Na	Na	Na	Na

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	80	83,05	103,81	80	81,82	102,28	90	90,91	101,01	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	90	100	111,11	93	100	107,53	92	100	108,70	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	81	100	123,46	87	100	114,94	92	100	108,70	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	90	100	111,11	90,00	100	111,11
		Presentase peningkatan	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	40	42,86	107,15	45	45	100,00

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		kualitas layanan keagamaan															
		Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	76	76,92	101,21	78	78,38	100,49
		Persentase efektifitas produk hukum daerah	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	95	100	105,26	96	100	104,17
		Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	95	100	105,26	96	100	104,17
	<b>Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>																
		Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80	81	101,25	75	99,47	132,63	83	99,14	119,45	Na	Na	Na	Na	Na	Na

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80	96,6	120,75	82	99,9	121,83	83	100	120,48	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80	95,63	119,54	81	85,13	105,10	82	100	121,95	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	90	100	111,11	91	100	109,89	92	100	108,70	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	90	100	111,11	91	100	109,89	92	100	108,70	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase efektivitas implementasi	90	100	111,11	91	100	109,89	92	100	108,70	Na	Na	Na	Na	Na	Na

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		kebijakan bidang hukum															
		Nilai Kematangan Organisasi Daerah	19	24,78	130,42	29	31,84	109,79	25	36,1	144,4	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	52,1	92,63	177,79	70	93,22	133,17	76,48	100	130,75	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	73	75	102,74	78	83,67	107,27	82	91,83	111,99	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	25	40	160	50	68,57	137,14	54	88,7	164,26	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan	80	100	125	70	70	100	88	90	102,27	Na	Na	Na	Na	Na	Na

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Sumber Daya Alam															
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	85	88,46	104,07	70	70	100	85	87,88	103,39	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85	87,5	102,94	70	70	100	90	90	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60	96,93	161,55	30	32	106,67	65	67,22	103,42	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85	85,71	100,84	71	85,71	120,72	85	85,71	100,84	Na	Na	Na	Na	Na	Na

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	80	75	93,75	70	80	114,29	88	87,5	99,43	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100	100	100	80	100	125	100	100	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85	85,41	100,48	80	83,33	104,16	85	81,25	95,59	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang	100	90	90	80	40	50	100	80	80	Na	Na	Na	Na	Na	Na

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Perekonomian yang dievaluasi															
		Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na
		Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	88	91,97	104,51	89	93,7	105,28



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	75,61	100	132,26	85,37	100	117,14
		Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	60,98	65,85	107,99	85,37	90,24	105,70
		Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	83,67	91,83	109,75	87,76	91,83	104,64
		Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	85	86,67	101,96	90	90	100,00
		Ketercapaian Laba BUMD	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	70	98,18	140,26	75	98,17	130,89
		Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	85	92,15	108,41	90	92,53	102,81

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang bidang SDA	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	80	82,61	103,26	82	84	102,44
	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah</b>																
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	75	75,63	100,84	76	77,5	101,97	77	82,75	107,47	Na	Na	Na	Na	Na	Na
	<b>Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah</b>																

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Nilai IKM Setda	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	78	85,73	109,91	78,5	86,15	109,75
		Nilai Sakip Setda	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	73,77	77,18	104,62	73,97	79	106,80
		<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</b>															
		Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	78	87,5	112,18	78,5	88,5	112,74
		Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	78	87,06	111,62	78,5	86,75	110,51
		Nilai IKM Biro ISDA	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	78	83,25	106,73	78,5	81,75	104,14
		Nilai IKM Biro Perekonomian	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	78	85,5	109,62	78,5	88,75	113,06
		Nilai IKM Biro Hukum	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	78	87,5	112,18	78,5	83,5	106,37
		Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	78	87,25	111,86	78,5	86,5	110,19
		Nilai IKM Biro Pemotdaker	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	78	86,75	111,22	78,5	83	105,73

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN
		Nilai IKM Biro Organisasi	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	78	88,37	113,29	78,5	82,75	105,41
		Nilai IKM Layanan Biro Umum	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	78	82,2	105,38	78,5	81,82	104,23
		<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>															
		Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	90	100	111,11	100	100	100,00

### 3.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 Biro memiliki 3 fungsi yaitu: pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Biro-Biro telah menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Hal tersebut dicerminkan oleh kinerja Tujuan dan Sasaran seluruhnya tercapai lebih dari 100%.

Tujuan Sekretariat Jawa Tengah dengan 4 indikator, capaian kinerjanya pada tahun 2023 seluruhnya diatas 100%. Pada level sasaran dengan 23 indikator seluruhnya tercapai diatas 100%. Hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain: Pengoptimalan peran Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan dan inisiatif inovatif untuk meningkatkan efektivitas kinerja Pemerintah Daerah. Secara terperinci analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun 2023 Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4  
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan/Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80	85,84	107,30	Melibatkan SKPD Teknis dan Stakeholder dalam proses perumusan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi publik</li> <li>Komunikasi yang efektif</li> <li>Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi</li> </ul>
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	89,12	104,85		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan pimpinan</li> <li>Kapasitas SDM</li> <li>Kebijakan dan regulasi</li> </ul>
		Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	%	90	100	111,11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah disusun tepat waktu</li> <li>Naskah kerjasama telah ditindaklanjuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen yang baik antar stakeholder yang terlibat;</li> <li>Adanya pemetaan kerjasama serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama</li> </ul>
			Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	45	45	100,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karena meningkatnya kesadaran kehidupan beragama di lingkungan masyarakat jawa tengah terutama antusiasme kalangan muslim;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan jateng bersolawat ari target indikator kinerja pelaksanaan 3 kali tercapai / terselenggara 8 kali;</li> <li>Peringatan Hari Santri dari target indikator 0 (tidak ada) menjadi 1 kali kegiatan;</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan/Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	78	78,57	100,73	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biro Perekonomian telah merumuskan kebijakan ke OPD sebanyak 42 OPD, yang efektif dilakukan oleh OPD sebanyak 33 OPD sehingga capaiannya 78,57 % dari target 78%. Yang dilaksanakan Biro perekonomian seperti : Melaksanakan Capacity Building TPID Provinsi Jawa Tengah secara periodik.</li> </ul>	Meningkatkan koordinasi ke OPD ampunan dan optimalisasi upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja
			Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	96	100	104,17	Adanya sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinergi antara aplikasi layanan E-PHD Provinsi Jawa Tengah dan Tata Praja sehingga semakin mempermudah pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;</li> <li>Peningkatan kualitas dan kuantitas Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>Peningkatan koordinasi antara Biro Hukum dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota.</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan/Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	%	96	100	104,17	Adanya sinergi dan koordinasi serta kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.	peningkatan koordinasi dan/ atau konsultasi antara Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam rangka pelayanan di bidang bantuan hukum dan HAM
		Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	89	93,7	105,28	Biro Perekonomian telah merumuskan kebijakan ke OPD sebanyak 42 OPD, yang efektif dilakukan oleh OPD sebanyak 33 OPD sehingga capaiannya 78,57 % dari target 78%. Yang dilaksanakan Biro perekonomian seperti : Melaksanakan Capacity Building TPID Provinsi Jawa Tengah secara periodik.	Meningkatkan koordinasi ke OPD ampunan dan optimalisasi upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja
			Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	%	85,37	100	117,14	Kematangan organisasi seluruh OPD Provins Jawa Tengah dalam kategori minimal sedang	Asessment kematangan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah
			Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas	%	87,76	91,83	104,64	OPD melakukan self assesment sehingga penilaian cenderung lebih tinggi	Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Inspektorat
			Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	85,37	90,24	105,70	Sebanyak 37 dari 41 OPD Provinsi Jawa Tengah memiliki predikat SAKIP A keatas	Pembinaan ke OPD terkait pemenuhan dokumen evaluasi SAKIP dan meningkatnya pemahaman implementasi saking



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan/Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
			Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	92,53	102,81	nilai diperoleh dari rata2 tender (212=100%), e purchasing (9933=100%) dan pencatatan (17385=77,58%)	melakukan monitoring evaluasi PBJ ke SKPD 2x setahun , melakukan reviu RUP setiap 6 bulan, melakukan fasilitasi PBJ kepada SKPD
			Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang bidang SDA	%	82	84	102,44	Persentase capaian kinerja sasaran bidang SDA mengalami peningkatan karena sinergitas antara OPD Pemprov Jateng dan OPD Kab/Kota di-Jawa Tengah	Perlu adanya peningkatan koordinasi pada tahun mendatang perihal capaian kegiatan OPD ampunan
			Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	90	90	100,00	Sinergi Perangkat Daerah Telah Berjalan dengan Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rakor Rumpun Kesra dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun dengan Asisten Kesra;</li> <li>Rakor Triwulanan dengan OPD Ampunan berjalan secara optimall;</li> <li>Penyusunan Rumusan Kebijakan telah ditindaklanjuti dengan OPD terkait.</li> </ul>
			Ketercapaian Laba BUMD	%	75	98,17	130,89	Jumlah BUMD yang mencapai target Laba dengan RBB atau RKAT BUMD ditahun tersebut	Melakukan monitoring dan evaluasi BUMD secara triwulanan
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai IKM Setda	%	78,5	86,15	109,75	Kualitas pelayanan Biro-biro Lingkup Setda terhadap responden sangat komunikatif, terbuka dan tanggap terhadap saran dan kritik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan prasarana</li> <li>Tidak ada biaya pelayanan</li> <li>Kualitas pelayanan</li> <li>Kapasitas SDM</li> <li>Komunikatif</li> </ul>
			Nilai Sakip Setda	%	73,97	79	106,80	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sangat baik pada 2/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam mencapai kinerja</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan/Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								unit kerja baik unit kerja utama maupun unit kerja pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi</li> <li>Pengukuran kinerja telah sampai ke level eselon III/Koordinator</li> </ul>
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	78,50	88,5	112,74	Tingkat capaian nilai indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan pelayanan dan mengevaluasi komponen pelayanan yang nilainya masih rendah
			Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	%	78,50	86,75	110,51	Tingkat capaian nilai indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatkan pelayanan dan mengevaluasi komponen pelayanan yang nilainya masih rendah
			Nilai IKM Biro ISDA	%	78,50	81,75	104,14	Tingkat capaian nilai IKM Biro Isda mengalami peningkatan dikarenakan masyarakat menilai Biro ISDA sudah memberikan pelayanan dengan cukup responsif terhadap produk pelayanan yang penting dan strategis	Perlu nya meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana, meningkatkan kompetensi SDM dan lebih luwes serta tidak terlalu prosedural dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat
			Nilai IKM Biro Perekonomian	%	78,50	88,75	113,06	Tingkat capaian nilai indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Biro Perekonomian	Meningkatkan pelayanan dan mengevaluasi komponen pelayanan yang nilainya masih rendah
			Nilai IKM Biro Hukum	%	78,50	83,5	106,37	Kualitas layanan dan sarana prasarana yang semakin baik	Dislesaikan Kamis Pukul 15.29 WIB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan/Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	%	78,50	86,5	110,19	Tingkat Pelayanan terkait pelaksanaan kegiatan kesra telah dirasakan oleh Masyarakat	- Distribusi hibah keagamaan tepat wakt dan tepat sasaran;
			Nilai IKM Biro Pemotdaker	%	78,50	83	105,73	adanya peningkatan kualitas layanan terutama pada unsur Kelengkapan Sarana dan Prasarana; Waktu Pelayanan; Kompetensi Pelaksana.	1. adanya perencanaan yang komprehensif dan matang pada setiap layanan 2. adanya koordinasi dengan stakeholder terkait
			Nilai IKM Biro Organisasi	%	78,50	82,75	105,41	Peningkatan pelayanan kinerja kepada OPD dan Kab Kota baik dibidang kelembagaan, akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi, pelayanan publik dan ketatalaksanaan	Meningkatkan pelayanan dan mengevaluasi komponen pelayanan yang nilainya masih rendah
			Nilai IKM Layanan Biro Umum	%	78,50	81,82	104,23	Tingkat capaian nilai indeks kepuasan masyarakat layanan Biro Umum sangat baik terbukti tingkat capaiannya 104,	Meningkatkan inovasi pelayanan umum kepada pimpinan dan masyarakat
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	%	100	100	100,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Biro Lingkup Setda</li> <li>Adanya evaluasi pencapaian kinerja setiap triwulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikatif antar Biro</li> <li>Fasiltasi kegiatan Biro</li> <li>(Pelayanan Publik, SKM, PPID, dll)</li> </ul>

#### 3.1.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebanyak Rp. 675.016.997.000,- dengan realisasi sebesar Rp.656.153.301.617,- atau 97,47% terdapat efisiensi sebesar 2,53%. Sasaran pertama, meningkatnya sinergitas kebijakan daerah pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp.447.163.120.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.436.001.221.260,- atau 97,50% terdapat efisiensi sebesar 2,50%. Sasaran kedua, meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung anggaran sebesar Rp. 17.088.917.000,- dengan realisasi sebesar Rp.16.457.294.805,- atau 96,30% terdapat efisiensi sebesar 3,70%. Sasaran ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah didukung anggaran sebesar Rp.210.489.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp.203.421.160.678,- atau 96,30% terdapat efisiensi sebesar 3,70%. Sasaran keempat, Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah didukung anggaran sebesar Rp.275.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.273.624.874 atau 96,23% terdapat efisiensi sebesar 3,77%.

Secara keseluruhan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN	Satuan	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				Target	Realiasasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	<b>Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah</b>						<b>210.764.960.000</b>	<b>203.694.785.552</b>	<b>96,30</b>	<b>3,70</b>
		Nilai IKM Setda	Angka	78,5	0	0,00	210.489.960.000	203.421.160.678	96,30	3,70
		Nilai Sakip Setda	Angka	73,97	0	0,00	275.000.000	273.624.874	96,23	3,77
2	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>						<b>275.000.000</b>	<b>273.624.874</b>	<b>96,23</b>	<b>3,77</b>
		Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	%	100	100	100	275.000.000	273.624.874	96,23	3,77
3	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</b>						<b>210.489.960.000</b>	<b>203.421.160.678</b>	<b>96,30</b>	<b>3,70</b>

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN	Satuan	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan	Angka	78,5	88,5	112,74	410.806.000	410.447.576	99,91	0,09
		Nilai IKM Biro Hukum	Angka	78,5	83,5	106,37	901.707.000	885.835.575	98,24	1,76
		Nilai IKM Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Angka	78,5	81,75	104,14	1.319.439.000	1.301.961.593	98,68	1,32
		Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	Angka	78,5	86,5	110,19	540.259.000	537.810.667	99,55	0,45
		Nilai IKM Biro Organisasi	Angka	78,5	82,75	105,41	594.300.000	588.076.661	98,95	1,05
		Nilai IKM Biro Pemotdaker	Angka	78,5	83	105,73	696.076.000	695.152.305	99,87	0,13
		Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Angka	78,5	86,75	110,51	400.999.000	399.765.975	99,69	0,31
		Nilai IKM Biro Perekonomian	Angka	78,5	88,75	113,06	294.980.000	294.187.093	99,73	0,27

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN	Satuan	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Nilai IKM Layanan Biro Umum	Angka	78,5	81,82	104,23	205.331.394.000	198.307.923.233	96,23	3,77
4	<b>Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>						<b>464.252.037.000</b>	<b>452.458.516.065</b>	<b>97,46</b>	<b>2,54</b>
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	89,12	104,85	17.088.917.000	16.457.294.805	96,30	3,70
		Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80	85,84	107,30	447.163.120.000	436.001.221.260	97,50	2,50
5	<b>Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>						<b>17.088.917.000</b>	<b>16.457.294.805</b>	<b>96,30</b>	<b>3,70</b>

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN	Satuan	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	89	93,7	105,28	3.117.200.000	3.114.178.070	99,90	0,10
		Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	92,53	102,81	3.664.001.000	3.591.174.865	98,01	1,99
		Ketercapaian Laba BUMD	%	75	98,17	130,89	1.833.016.000	1.341.625.868	73,19	26,81
		Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	90	90	100,00	2.302.500.000	2.290.497.242	99,48	0,52
		Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	%	82	84	102,44	3.916.500.000	3.875.988.260	98,97	1,03



No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN	Satuan	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas	%	87,76	91,83	104,64	391.000.000	390.630.340	99,91	0,09
		Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	85,37	90,24	105,70	1.164.000.000	1.156.321.061	99,34	0,66
		Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	%	85,37	100	117,14	700.700.000	696.879.099	99,45	0,55
6	<b>Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah</b>						<b>447.163.120.000</b>	<b>436.001.221.260</b>	<b>97,50</b>	<b>2,50</b>

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN	Satuan	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	78	78,57	100,73	1.195.000.000	1.192.922.077	99,83	0,17
		Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	%	90	100	111,11	4.252.130.000	4.198.827.417	98,75	1,25
		Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	96	100	104,17	1.969.000.000	1.957.569.980	99,42	0,58
		Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	%	96	100	104,17	1.350.000.000	1.347.118.660	99,79	0,21

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN	Satuan	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
				Target	Realiasasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisai	Capaian (%)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	45	45	100,00	438.396.990.000	427.304.783.126	97,47	2,53
<b>JUMLAH</b>							<b>675.016.997.000</b>	<b>656.153.301.617</b>	<b>97,47</b>	<b>2,53</b>

### 3.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 4 sasaran strategis, yang disinergikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan program/kegiatan selanjutnya akan dianalisis dengan membandingkan rata-rata tingkat capaian kinerja tiap Sasaran dengan capaian kinerja program/kegiatan yang mendukung.

Sasaran pertama "Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah" memiliki rata-rata tingkat capaian sebesar 104,35%, sedangkan rata-rata tingkat capaian program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 103,07%. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 99,07%, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan antara lain pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mampu mewujudkan pelaksanaan formulasi kebijakan yang efektif.

Sasaran kedua "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" memiliki rata-rata tingkat capaian sebesar 108,61%, sedangkan rata-rata capaian program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 111,84%. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 102,97%, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan antara lain pada Program Penataan Organisasi dan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang mampu mengawal pencapaian target-target kinerja seluruh urusan pembangunan daerah.

Sasaran ketiga "Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah" memiliki tingkat capaian sebesar 108,04%, sedangkan rata-rata capaian program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 100%. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 92,55%, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan antara lain pada program administrasi umum yang mampu mewujudkan layanan umum Sekretariat Daerah secara prima.

Sasaran keempat "Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah" memiliki tingkat capaian sebesar 100%, sedangkan rata-rata capaian program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 100%. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 100%,

yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan antara lain pada Program Administrasi Umum yang mampu mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif.

Secara keseluruhan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah						
	Nilai Sakip Setda	106,80				Menunjang
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah						
	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	100				Menunjang
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	100	Menunjang
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah						
	Nilai IKM Setda	109,75				Menunjang
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah						
	Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan	112,74				Menunjang
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
				Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan	100	Menunjang
	Nilai IKM Biro Hukum	106,37				
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum	100	Menunjang
	Nilai IKM Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	104,14				
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
				Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				Jumlah Orang Yang di Sosialisasi Ketentuan si Bidang Cukai	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang	100	Menunjang
	Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	110,19				Menunjang
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
				Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat	100	Menunjang
	Nilai IKM Biro Organisasi	105,41				
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
				Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang



Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	Menunjang
	Nilai IKM Biro Pemotdaker	105,73				Menunjang
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
				Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra	100	Menunjang
	Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	110,51				Menunjang
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
				Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	Menunjang
	Nilai IKM Biro Perekonomian	113,06				Menunjang
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
				Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian	100	Menunjang
	Nilai IKM Layanan Biro Umum	104,23				
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			
				Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas	100	Menunjang
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			
				Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan	100	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Keprotokolan			
				Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan	100	Menunjang
				Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga	100	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan	100	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
				Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT	100	Menunjang
				Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
				Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan	100	Menunjang
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
				Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur	100	Menunjang
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	104,85				Menunjang
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
	Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	105,28				Menunjang
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
				Capaian Pelaksanaan APBD	100,96	Menunjang
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	100	Menunjang
				Capaian Pelaksanaan APBN	104	Menunjang
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	100	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	100	Menunjang
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	100	Menunjang
				Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	109,14	Menunjang
				Persentase realisasi bantuan keuangan	113,02	Menunjang
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	100	Menunjang
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	100	Menunjang
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	100	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	100	Menunjang
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	100	Menunjang
	Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	102,81				Menunjang
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
				Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	100	Menunjang
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
				Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	100	Menunjang
				Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	100	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
				Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	100	Menunjang



Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi	100	Menunjang
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
				Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	75	Menunjang
	Ketercapaian Laba BUMD	130,89				Menunjang
			PROGRAM PEREKONOMIAND ANPEMBANGUNA N			
				Nilai kemandirian BLUD	100	Menunjang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			
				Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD	100	Menunjang
				Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	104,16	Menunjang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			
				Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	100	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha	100	Menunjang
				Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	102,35	Menunjang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			
				Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	100	Menunjang
	Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	100				Menunjang
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
				Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	100	Menunjang
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	100	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	100	Menunjang
				Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	100	Menunjang
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan	100	Menunjang
	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	102,44				Menunjang
			PROGRAM PEREKONOMIAND ANPEMBANGUNA N			
				Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	100	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	Menunjang
				Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	100	Menunjang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100	Menunjang
				Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	100	Menunjang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	100	Menunjang
	Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas	104,64				Menunjang
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
				Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	103,13	Menunjang
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	100	Menunjang
				Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	95,75	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	100	Menunjang
	Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	105,70				Menunjang
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
				Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	100	Menunjang
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	100	Menunjang
				Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	100	Menunjang
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
				Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	100	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	117,75	Menunjang
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	100	Menunjang
	Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	117,14				Menunjang
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
				Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	100	Menunjang
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	100	Menunjang
				Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	100	Menunjang
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	454,96	Menunjang
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	100	Menunjang
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
	Persentase Kebijakan yang Efektif	107,30				Menunjang
Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah						
	Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	100,73				
			PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANGUNAN			



Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	104,88	Menunjang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			
				jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	100	Menunjang
				jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	100	Menunjang
				Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	100	Menunjang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			
				jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	100	Menunjang
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	100	Menunjang
	Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	111,11				

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
				Efektivitas kerjasama daerah	105,26	Menunjang
			Fasilitasi Kerjasama Daerah			
				Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	105,26	Menunjang
				Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	111,11	Menunjang
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	100	Menunjang
				Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	105,26	Menunjang
			Pelaksanaan Otonomi Daerah			

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	100	Menunjang
				Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	0	Menunjang
				Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Menunjang
	Persentase efektifitas produk hukum daerah	104,17				Menunjang
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
				Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	100	Menunjang
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			
				Jumlah dokumen kajian produk hukum	100	Menunjang
				Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	100	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
	Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	104,17				Menunjang
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
				Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	100	Menunjang
			Fasilitasi Bantuan Hukum			
				Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	100	Menunjang
				Persentase kabupaten/kota peduli HAM	104,17	Menunjang
			Fasilitasi Bantuan Hukum			
				Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	100	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan, Saasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	100				Menunjang
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
				Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	100	Menunjang
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			
				Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	100	Menunjang
				Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	100	Menunjang

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023, didukung APBD sebesar Rp 675.016.997.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima milyar enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Program Administrasi Umum didukung APBD sebesar Rp. 210.764.960.000,- terealisasi sebesar Rp. 203.694.785.552,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 96,65%.
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah didukung APBD sebesar Rp.4.252.130.000,- terealisasi sebesar Rp.4.198.827.417,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 98,75%.
3. Program Kesejahteraan Rakyat didukung APBD sebesar Rp.440.699.490.000,- terealisasi sebesar Rp.429.595.280.368,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 97,48%
4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum didukung APBD sebesar Rp.3.319.000.000,- terealisasi sebesar Rp.3.304.688.640,-sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 99,57%
5. Program Perekonomian dan Pembangunan didukung APBD sebesar Rp. 6.944.516.000,- terealisasi sebesar Rp.6.410.536.205,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 92,31%
6. Program Penataan Organisasi didukung APBD sebesar Rp. 2.255.700.000,- terealisasi sebesar Rp.2.243.830.500,-sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 99,47%
7. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa didukung APBD sebesar Rp. 3.664.001.000,- terealisasi sebesar Rp.3.591.174.865,-sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 98,01%
8. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan didukung APBD sebesar Rp. 3.117.200.000,- terealisasi sebesar Rp.3.114.178.070,-sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 99,90%.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci per program dan kegiatan, sebagaimana dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>210.764.960.000</b>	<b>203.694.785.552</b>	<b>96,65</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275.000.000	273.624.874	99,50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.224.439.000	12.302.181.551	93,03
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.635.000.000	1.619.503.086	99,05
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	17.916.000.000	17.837.552.196	99,56
	Fasilitasi Keprotokolan	1.921.000.000	1.908.009.501	99,32
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.557.293.000	85.897.487.610	98,10
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	677.500.000	625.062.831	92,26
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	30.000.000	27.426.700	91,42
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.983.192.000	18.833.936.442	99,21
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.357.538.000	23.970.328.362	98,41
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.011.935.000	10.743.045.360	97,56
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27.318.864.000	23.850.859.904	87,31

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.857.199.000	5.805.767.135	99,12
<b>2</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>3.117.200.000</b>	<b>3.114.178.070</b>	<b>99,90</b>
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2.171.200.000	2.170.034.810	99,95
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	946.000.000	944.143.260	99,80
<b>3</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>3.664.001.000</b>	<b>3.591.174.865</b>	<b>98,01</b>
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	920.000.000	908.225.426	98,72
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.049.527.000	2.000.400.059	97,60
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	694.474.000	682.549.380	98,28
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>6.944.516.000</b>	<b>6.410.536.205</b>	<b>92,31</b>
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.833.016.000	1.341.625.868	73,19
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.195.000.000	1.192.922.077	99,83
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	3.916.500.000	3.875.988.260	98,97
<b>5</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>440.699.490.000</b>	<b>429.595.280.368</b>	<b>97,48</b>
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1.025.000.000	1.018.818.146	99,40



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1.277.500.000	1.271.679.096	99,54
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	438.396.990.000	427.304.783.126	97,47
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>2.255.700.000</b>	<b>2.243.830.500</b>	<b>99,47</b>
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.555.000.000	1.546.951.401	99,48
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	700.700.000	696.879.099	99,45
<b>7</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>4.252.130.000</b>	<b>4.198.827.417</b>	<b>98,75</b>
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.670.450.000	1.665.766.573	99,72
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	1.340.790.000	1.330.375.963	99,22
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.240.890.000	1.202.684.881	96,92
<b>8</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>3.319.000.000</b>	<b>3.304.688.640</b>	<b>99,57</b>
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.969.000.000	1.957.569.980	99,42
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.350.000.000	1.347.118.660	99,79
<b>TOTAL</b>		<b>675.016.997.000</b>	<b>656.153.301.617</b>	<b>97,21</b>

### 3.3 INOVASI

#### 1. Biro Hukum

Biro Hukum pada tahun 2023 telah melakukan beberapa inovasi sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan layanan dan peran serta kepada masyarakat, aparatur pemerintah dan lembaga pemerintah, antara lain :

- a. Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah menjadi pusat layanan hukum yang terpadu dalam satu pintu untuk memudahkan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mengakses layanan bidang hukum.

- b. Pembuatan New Branding (Logo Baru) JDIH Provinsi Jawa Tengah dan menciptakan tagline “Ngayemi Lan Nglayani” yang bertujuan agar masyarakat, aparatur pemerintah dan lembaga lain semakin merasakan kemudahan dan kenyamanan atas layanan yang diberikan oleh Biro Hukum.
- c. Membangun “Satu Data Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah” sebagai upaya membantu kepada semua pihak dalam membutuhkan informasi produk-produk hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar semakin cepat, mudah, efektif dan efisien. LKjIP Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 58.
- d. Membuat New Branding dan pengembangan aplikasi semula bernama SIP-PROKUMDA menjadi WASKITO Jateng bertujuan agar pelaksanaan fasilitasi, evaluasi dan pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota semakin efektif, cepat dan efisien.

2. Biro Perekonomian

Pada tahun 2023 Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah menyusun inovasi baru untuk mengetahui jumlah arus mudik baik pada angkutan umum maupun penumpang yang masuk dan melawati Jawa Tengah yaitu DARI RANTAU.

3. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung terwujudnya reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi yang termasuk dalam 10 Program Unggulan Gubernur Jawa Tengah, melakukan inovasi sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Monitoring Barang Jasa (SIMONBAJA)

Gambar 3.1  
SIMONBAJA

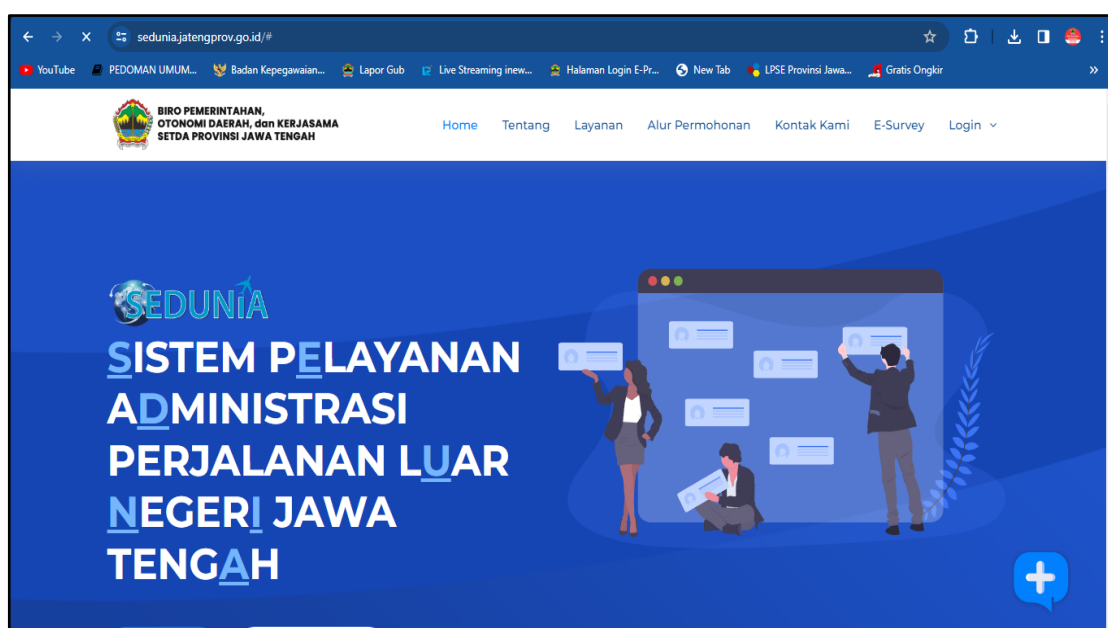




b. SEDUNIA

SEDUNIA adalah Sistem pelayanan administrasi perjalanan Luar Negeri Jateng yang dikembangkan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing Kabupaten/Kota hanya diberikan 2 (dua) akun sebagai Pemohon.

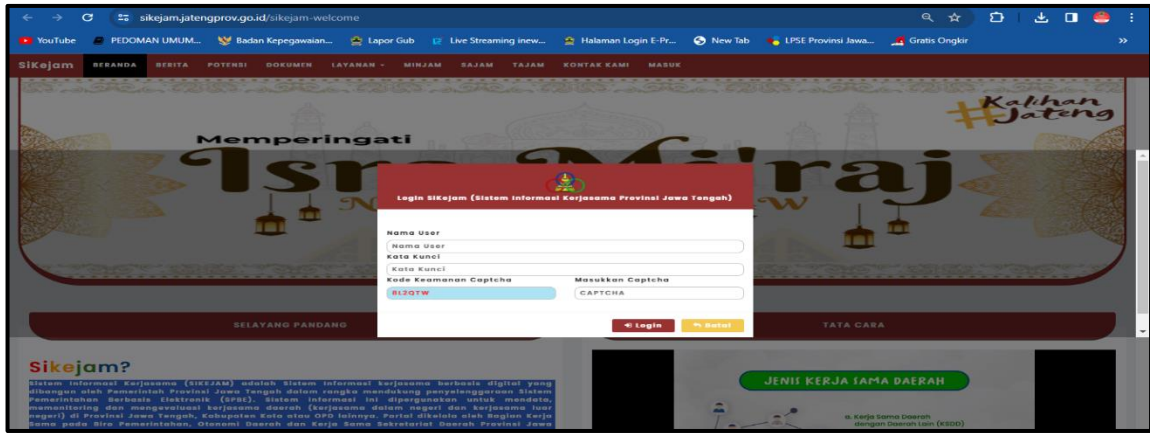
**Gambar 3.4**  
**Aplikasi SEDUNIA**



c. SIKEJAM

Sistem Informasi Kerjasama (SIKEJAM) adalah Sistem Informasi kerjasama berbasis digital yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem informasi ini dipergunakan untuk mendata, memonitoring dan mengevaluasi kerjasama daerah (kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri) di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kota atau OPD lainnya.

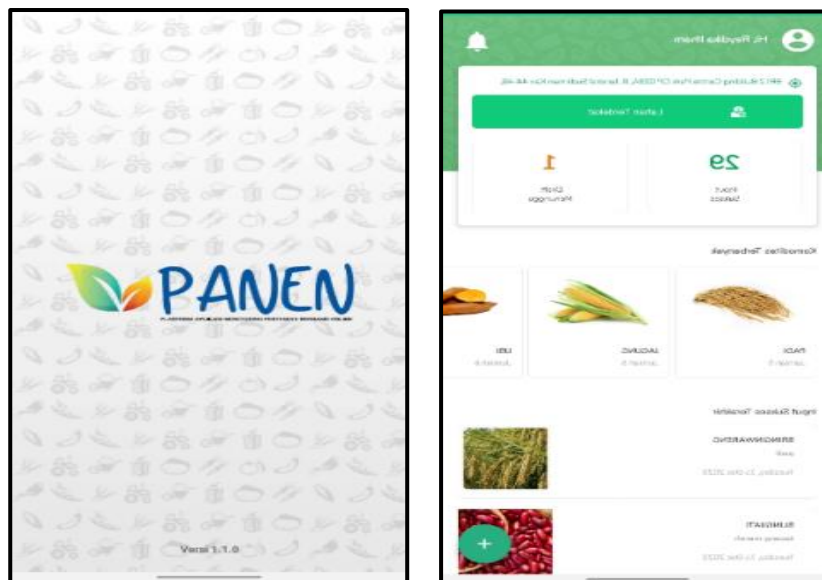
**Gambar 3.5**  
**Aplikasi SIKEJAM**



6. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya

Adapun inovasi yang dilakukan pada tahun 2023, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya adalah pembuatan Aplikasi PANEN. Aplikasi PANEN berisikan informasi data tanam, komoditas pertanian, luas lahan, lokasi, waktu panen dan perkiraan produksi. Aplikasi PANEN akan menjadi supporting dari Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA).

**Gambar 3.6**  
**Aplikasi PANEN**



7. Biro Umum

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Biri Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 membuat inovasi *e-Office*. Aplikasi *e-Office* adalah aplikasi persuratan yang digunakan di lingkungan Biro Umum dimana aplikasi ini digunakan untuk memamanajemen surat masuk dan surat keluar, serta untuk melakukan manjemen disposisi dari pimpinan. Untuk melakukan disposisi langsung melalui aplikasi berbasis android, dan disposisi

akan langsung terdistribusikan mulai dari essolan 3, eselon 4 sampai staf, disposisi tersebut akan langsung otomatis melalui notifikasi whatsapp.

Gambar 3.7  
Aplikasi e-Office



## 8. Biro Kesejahteraan Rakyat

### a. Silap Online Desa Dampungan

Sistem Pelaporan Online (Silap Online) Desa Dampungan, merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas LKJIP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jateng Tahun 2023 25 pelaksanaan Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Sejahtera. Program tersebut dimulai sejak tahun 2019 dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, utamanya dengan melibatkan secara langsung semua Perangkat Daerah terjun langsung ke desa-desa miskin untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Sistem yang dikembangkan dimaksudkan untuk mendapatkan data Perangkat Daerah yang melakukan pendampingan, desa-desa yang didampingi serta upaya-upaya intervensi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Sistem tersebut diharapkan mampu menyediakan data sekaligus sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap efektifitas pelaksanaan program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Sejahtera.

b. Silap Online CSR

Guna mengetahui kontribusi dan peran CSR perusahaan dalam pembangunan daerah di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membangun Sistem Pelaporan Online CSR "SiLap CSR" untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan program/kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan swasta, BUMN dan BUMD di Jawa Tengah, yang telah di-launching oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 2 Maret 2021. Dengan adanya aplikasi SiLap CSR tersebut, diharapkan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan CSR oleh perusahaan makin efektif dan efisien, dan kontribusi CSR bagi pembangunan daerah di Jawa Tengah makin meningkat. Pelaporan melalui Silap CSR dilakukan oleh perusahaan dengan menyebutkan kegiatan, output, nominal, waktu, lokasi serta keterangan yang perlu disampaikan terkait kegiatan CSR yang sudah dilakukan. Kegiatan CSR dibagi menjadi 12 (dua belas) bidang yaitu Bidang Pendidikan, Kesehatan, Olahraga Seni Budaya dan Pariwisata, Kesejahteraan Sosial, Usaha Ekonomi Rakyat, Keagamaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertanian Perkebunan Kehutanan Peternakan Kelautan dan Perikanan, Energi Baru Terbarukan, Kedaruratan, Pendampingan Umum dan Infrastruktur.

### 3.4 PENGHARGAAN

#### 1. Biro Hukum

Sebagai wujud kinerja nyata pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Urusan-Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Oktober 2023 pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dan *Legal Development Content Creator* (LDCC) Awards Tahun 2023 dengan tema "Membangun Hukum Nasional sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa melalui Transformasi Digital" di Jakarta berhasil sukses meraih "TERBAIK KE-1 SEBAGAI PENGELOLA JDIH TERBAIK KATEGORI PROVINSI" setelah 3 tahun berturut-turut menjadi terbaik ke-2. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah. Penghargaan diperoleh dikarenakan peningkatan kualitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sesuai standar pengelolaan yang telah ditetapkan serta rutin membina anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah di Daerah.

Pada puncak acara puncak Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-75 dengan tema "Harmoni Dalam Keberagaman" di Jakarta tanggal 10 Desember 2023

melalui Pj. Gubernur Jawa Tengah didampingi Kepala Biro Hukum menerima penghargaan sebagai "PROVINSI TERBAIK PEMBINA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM" yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan satu-satunya Provinsi dengan jumlah Kabupaten/Kota terbanyak yang mendapatkan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

**Gambar 3.8**  
**Penerimaan Penghargaan Terbaik I JDIIH Awards Tahun 2023**



**Gambar 3.9**  
**Penerimaan Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023**



## 2. Biro Perekonomian

Pada tahun 2023 Biro Perekonomian telah memperoleh penghargaan Anugrah Adinata Syariah Tahun 2023 pada tanggal 26 Mei 2023 yang disampaikan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin berupa :

- a. Juara 4 Kategori Program Inovasi pada sektor Ekonomi Syariah



b. Juara 5 kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

**Gambar 3.10**  
**Piagam Penghargaan Anugrah Adinata Syariah Tahun 2023**



### 3. Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bulan Oktober Tahun 2023 memperoleh penghargaan sebagai Provinsi Dengan Transaksi Pengadaan Terbanyak Melalui Toko Daring dalam ajang Indonesia Internasioanl 28 *Sustainable Procurement Expo* (I2SPE) Tahun 2023 sebagaimana gambar dibawah ini:

**Gambar 3.11**



#### 4. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah meraih 3 penghargaan, yaitu:

- a. Juara 2 Nasional Kategori Provinsi Penghargaan Bhumandala Award. Penyerahan Penghargaan oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Mohamad Arief dan Penghargaan Bhumandala Award 2023 diterima oleh Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama, 6 November 2023;
- b. Provinsi Jawa Tengah Mendapatkan Peringkat ke-5 Provinsi dengan Penerapan SPM terbaik se-Indonesia;
- c. Penerimaan Penghargaan Daerah Yang Berkinerja Tertinggi Secara Nasional Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022.

Gambar 3.12

Piagam Penghargaan Bhumandala Award Juara 2 Nasional Kategori Provinsi



Gambar 3.13

SPM AWARDS Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

1. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 memiliki indikator Tujuan dan Sasaran sebanyak 27 indikator, yang seluruhnya dalam kategori "**sangat baik**". Hal yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja, antara lain: kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah; efektifnya pengendalian kinerja perangkat daerah oleh Biro lingkup Setda sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan di Jawa Tengah; dan adanya perbaikan layanan umum Sekretariat Daerah.
2. Seluruh indikator Tujuan dan Sasaran tahun 2019 – 2023 seluruhnya dalam kategori "**sangat baik**" meski sempat terjadi Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang mempengaruhi kebijakan manajemen sistem kerja Pemerintah Daerah Jawa Tengah secara keseluruhan dan adanya refocusing anggaran yang diprioritaskan untuk pada bidang kesehatan.
3. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengendalian pencapaian kinerja seluruh urusan pembangunan. Namun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Setda **dirumuskan secara komposit** sehingga **tidak dapat disandingkan** dengan target kinerja nasional.
4. Seluruh indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran sebanyak 27 indikator tercapai diatas 100%. Hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain: Adanya sinergi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan, koordinasi yang intensif dalam mengawal kinerja OPD ampunan serta adanya sinergi dan kerjasama daerah dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
5. **Anggaran** Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebanyak **Rp.675.016.997.000,-** dengan **realisasi** sebesar **Rp.656.153.301.617,-** atau **97.21%** terdapat efisiensi sebesar **2.79%**.
6. Kinerja **Tujuan** Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 4 **sasaran strategis**, yang seluruhnya tercapai secara **sinergis** dengan kinerja **program** dan **kegiatan**. Hal tersebut ditunjukkan antara lain

oleh Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah mampu mewujudkan pelaksanaan formulasi kebijakan yang efektif; Program Perekonomian dan Pembangunan mampu mengawal pencapaian target-target kinerja urusan pembangunan daerah; dan Program Administrasi Umum mampu mewujudkan layanan umum secara prima dan meningkatkan akuntabilitas Sekretariat Daerah.

#### 4.2. REKOMENDASI

Terhadap permasalahan diatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Biro-Biro **meningkatkan sinergi dan kolaborasi** dengan SKPD teknis dan *stakeholders lainnya* guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal.
2. Biro-Biro melaksanakan **agenda dan kebijakan** pembangunan yang **bersinergi** dengan agenda dan kebijakan **Pemerintah pusat** yang dilaksanakan **di Provinsi Jawa Tengah**.
3. Biro-Biro **meningkatkan pengendalian** terhadap **kinerja SKPD teknis** melalui **optimalisasi** pemanfaatan ***E-Controlling Kinerja*** sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.
4. Biro-Biro meningkatkan pelaksanaan **agenda-agenda** yang mampu **mendukung target kinerja Program dan Kegiatan** yang dapat **mengungkit kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah**.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah khususnya, serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan No. 9 Telpn. 024-8311174 ( 20 saluran ) Fax. 024-8311266  
Semarang 50243

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



SUMARNO, S.E., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, 2023

Pihak Pertama,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

  
Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	90
2.	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	95
		Persentase efektivitas produk hukum daerah	96
		Persentase Peningkatan kualitas layanan keagamaan	45
		Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	90
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Nilai IKM Biro Biro Hukum	78,5
		2. Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	78,5
		3. Nilai IKM Biro Pemotdaker	78,5

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

SETDA  
SUMARNO, S.E., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

  
Dra. EMA BACHIMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. Pahlawan No. 9 Telpn. 024-8311174 ( 20 saluran ) Fax. 024-8311266  
Semarang 50243

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.A.P.Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si

Jabatan : Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

SUMARNO, S.E., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
ASISTEN EKONOMI DAN  
PEMBANGUNAN

  
Dr.A.P.Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651204 199203 1 012




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Ketercapaian Laba BUMD	75
		2. Persentase Capaian Kinerja Sasaran	82
		3. Efektifitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	90
2.	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	78
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	78,5
		2. Nilai IKM Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	78,5
		3. Nilai IKM Layanan Biro Perekonomian	78,5

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

SUMARNO, S.E., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
ASISTEN EKONOMI DAN  
PEMBANGUNAN

  
Dr. A.P.Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651204 199203 1 012



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan No. 9 Telpon. 024-8311174 ( 20 saluran ) Fax. 024-8311266  
Semarang 50243

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARIF SAMBODO, S.E., M.Si

Jabatan : Asisten Administrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2023

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Pihak Pertama,  
ASISTEN ADMINISTRASI

SUMARNO, S.E., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

MUHAMMAD ARIF SAMBODO, S.E., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640518 198903 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ASISTEN ADMINISTRASI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	85,37
		2. Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	89
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Setda	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Setda	1. Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan.	78,5
		2. Nilai IKM Biro Organisasi	78,5
		3. Nilai IKM Layanan Biro Umum	78,5

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

  
SUMARNO, S.E., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, 2023  
Pihak Pertama,  
ASISTEN ADMINISTRASI

  
MUHAMMAD ARIF SAMBODO, S.E., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640518 198903 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266  
Semarang 50243

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS MUNAWAR SHODIQ, SH

Jabatan : Plt. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi  
Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

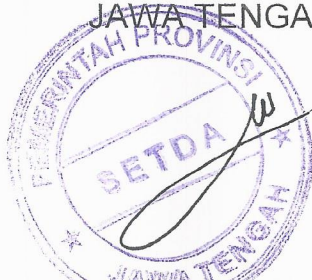
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PENGADAAN BARANG/JASA SETDA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan  
Barang/Jasa

AGUS MUNAWAR SHODIQ, SH  
Pembina  
NIP. 19670721 198603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

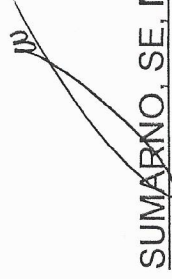
No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	95
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Efektivitas pengadaan secara elektronik	90
3.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Persentase permasalahan kelembagaan ukpbj dan proses pengadaan barang/jasa yang terfasilitasi	92
4.	Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	Presentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro APBJ	100

**Program**

- | Program  | Anggaran            | Keterangan |
|--|---------------------|------------|
| 1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Rp. 3.578.269.000,- | APBD       |
| 2. Program Administrasi Umum                                 | Rp. 371.731.000,-   | APBD       |

Semarang, 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

  
SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Pt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

  
AGUS MUNAWAR SHODIQ, SH

Pembina  
NIP. 19670721 198603 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran ) Fax. 8311266  
Semarang 50243

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDI FAIZ EFFENDI, SPi, MA

Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



**SUMARNO, SE, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001

Pihak Pertama,  
KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH

**ENDI FAIZ EFFENDI, SPi, MA**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197109091996031006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Pelaksanaan APBD (%)	98,5
		Capaian Pelaksanaan APBN (%)	95,5
		Persentase realisasi bantuan keuangan (%)	85
		Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah (%)	85
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi (%)	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah (%)	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda (%)	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp. 2.683.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
2. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Rp. 620.006.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



**SUMARNO, SE, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001

Pihak Pertama,  
KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH

**ENDI FAIZ EFFENDI, SPI, MA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197109091996031006





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang – 50243

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum  
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : SUMARNO, SE, MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

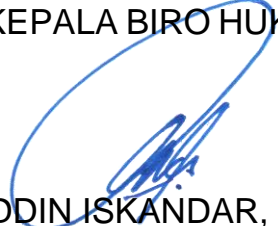
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
  
SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

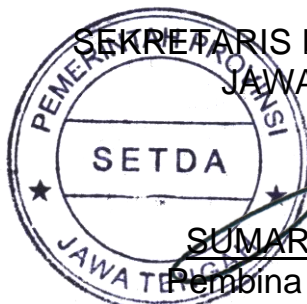
Pihak Pertama  
KEPALA BIRO HUKUM  
  
IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	100%
3.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	1. Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	100%
		2. Persentase kabupaten/kota peduli HAM.	96%
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Hukum.	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Rp. 3.184.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
2. Program Administrasi Umum	Rp. 601.707.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%

Semarang, 9 Januari 2023



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024) 83111266  
kodepos 50243 <http://www.jatengprov.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DADANG SOMANTRI

Jabatan : Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN  
SUMBER DAYA ALAM SETDA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DADANG SOMANTRI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650622 198703 1 007

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**Unit Kerja : Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam**

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang pertanian	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	90 %
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi ESDM, lingkungan hidup dan kehutanan	Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	95%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan koordinasi bidang infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	96 %
4.	Meningkatnya kualitas capaian administrasi Umum dan Keuangan Biro ISDA dan Asisten Ekbang	Presentase capaian administrasi Umum dan Keuangan Biro ISDA dan Asisten Ekbang	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program perekonomian dan pembangunan	Rp. 3.916.500.000,-	APBD
Program administrasi umum	Rp. 1.219.439.000,-	APBD

Semarang, **9 Januari** 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



Diandatangani secara elektronik oleh:

**SUMARNO, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN  
SUMBER DAYA ALAM SETDA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Diandatangani secara elektronik oleh:

**DADANG SOMANTRI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650622 198703 1 007



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHSEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024) 83111266  
kodepos 50243 <http://www.jatengprov.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. IMAM MASKUR, M.Si

Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



Drs. IMAM MASKUR, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690512 199401 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan efektivitas pembangunan urusan pelayanan dasar	Persentase Capaian Kinerja program Bidang Pelayanan Dasar	95%
2.	Meningkatkan efektivitas pembangunan urusan non pelayanan dasar	Persentase Capaian Kinerja program Bidang Non Pelayanan Dasar	95%
3.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan	Persentase Fasilitas Keagamaan dalam kondisi baik	42%
4.	Terlaksananya Administrasi Umum dan Keuangan	Persentase Fasilitas Administrasi Umum dan Keuangan	100%

**Program**

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 440.541.225.000,-	APBD
2. Program Administrasi Umum	Rp. 540.259.000,-	APBD

Semarang, 09 Januari 2023



KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

  
Drs. IMAM MASKUR, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690512 199401 1 001



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024) 83111266  
kodepos 50243 <http://www.jatengprov.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM

Jabatan : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 31 Januari 2023

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO ORGANISASI

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 197005141992021001

Dr. Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19641104 198903 1 013



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BIRO ORGANISASI**

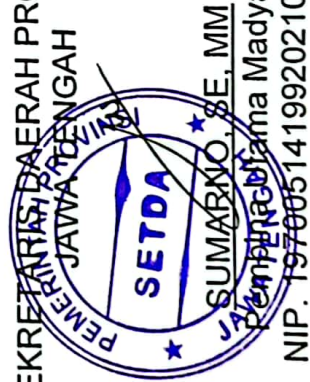
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan Provinsi Tengah	Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	34,15%
2	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan Kab/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	80%
3	Meningkatnya efektivitas Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	87,80%
4	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	95,92%
5	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	91,42%
6	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase OPD yang nilai SAKIPnya meningkat	85,37%
7	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	89,47%

8	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	85,63%
9	Meningkatnya efektivitas Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100%
10	Meningkatnya efektivitas Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penataan Organisasi	Rp. 2.992.000.000,-	APBD
2. Program Administrasi Umum	Rp. 494.300.000,-	APBD

Semarang, 31 Januari 2023  
 KEPALA BIRO ORGANISASI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH



*[Signature]*  
Dr. Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19641104 198903 1 013



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266  
Semarang 50243

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si  
Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19680517 198908 1 002

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



SUMARNO SE,MM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19700514 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kerjasama Daerah	1) Efektivitas kerjasama daerah	95 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Umum	2) Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	90 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3) Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95 %
4.	Meningkatnya Kualitas IKM Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama	4) Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	100 %

**PROGRAM**

- 1) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- 2) Program Administrasi Umum

**ANGGARAN**  
(Rp)

3.836.130.000  
511.076.000

**KETERANGAN**

APBD Tahun 2023  
APBD Tahun 2023

Semarang, 9 Januari 2023

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19680517 198908 1 002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19700514 199202 1 001



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO, SE, MM

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

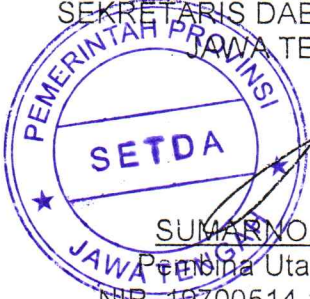
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

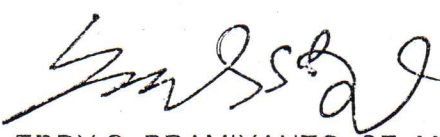
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
  
SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH  
  
EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660611 198602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

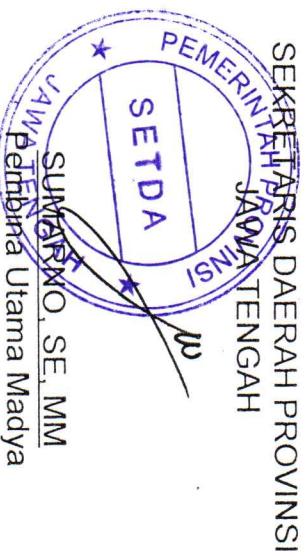
Unit Kerja : Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi Perencanaan	a. Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan b. Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	82 % 77 %
2	Meningkatnya laba BUMD	a. Tingkat kesehatan BUMD aneka usaha b. Tingkat kesehatan BUMD Jasa Keuangan	80 % 85 %
3	Meningkatnya Kemandirian BLUD	Meningkatnya nilai kemandirian BLUD	55 %
4	Meningkatnya IKM Biro Perencanaan	Persentase capaian administrasi Umum dan Keuangan Biro Perencanaan	100%

Program  
 1. Perencanaan Pembangunan Rp. 3.045.000.000,-  
 2. Administrasi Umum Rp. 294.980.000,-

Keterangan  
 APBD  
 APBD

Semarang, 9 Januari 2023



SUMARNO, SE, MM  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH  
 EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660611 198602 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang 50243  
Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile 8311266  
Laman <http://www.jawatengah.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. WACHJU ALAMSYAH, S.H.  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUMARNO, S.E, M.M.  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

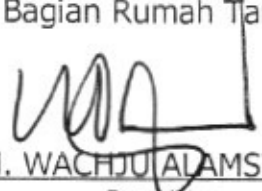
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

  
SUMARNO, S.E, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA BIRO UMUM  
Kepala Bagian Rumah Tangga Setda

  
MOH. WACHJU ALAMSYAH, S.H.  
Pembina  
NIP. 19680505 199703 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Program Administrasi Umum</b>			
1	Meningkatkan kualitas administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100%
2	Meningkatkan kualitas administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100%
3	Meningkatkan kualitas administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100%



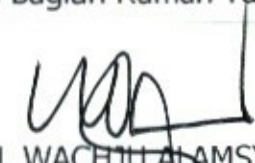
No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Administrasi Umum	Rp. 197.979.219.000,-	Sumber Anggaran APBD Tahun 2023

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH  
  
★ SUMARNO, S.E. M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama,  
Pit. KEPALA BIRO UMUM  
Kepala Bagian Rumah Tangga Setda

  
MOH. WACHJU ALAMSYAH, S.H.  
Pembina  
NIP. 19680505 199703 1 007

## FOTO-FOTO KEGIATAN

### DOKUMENTASI FPD PENYUSUNAN RENSTRA 2024-2026



## DOKUMENTASI RAKOR EVALUASI BIRO-BIRO LINGKUP SETDA TAHUN 2023



## DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI DAN FGD



